

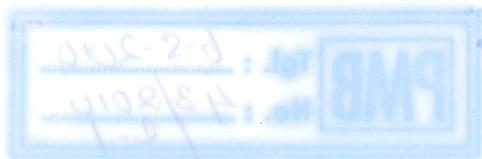


**PERKEMBANGAN
PENDAPATAN MASYARAKAT
DI LOKASI COREMAP II
DESA JAGO-JAGO DAN SITARDAS,
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERKEMBANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II DESA JAGO-JAGO DAN SITARDAS, KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Oleh:

SRI SUNARTI PURWANINGSIH
GUTOMO BAYU AJI



© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Perkembangan Pendapatan Masyarakat di Lokasi COREMAP II,
Desa Jago-jago dan Sitardas, Kabupaten Tapanuli Tengah/Sri
Sunarti Purwaningsih, Gutomo Bayu Aji – Jakarta: 2010.

xii + 72 hlm.; 14,8 x 21 cm

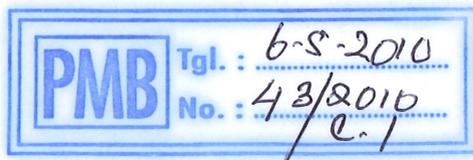
ISBN 978-602-8717-42-7

1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333.911



*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720
Telp.: (021) 5207205, 5221687
E-mail: ppk-lipi@rad.net.id



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II di beberapa lokasi di Indonesia Bagian Barat telah berjalan kurang lebih lima tahun. Selama kurun waktu pelaksanaan COREMAP tersebut, berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang, pengelolaan berbasis masyarakat dan pengawasan telah dilakukan.

Untuk melihat keberhasilan COREMAP dari aspek sosial – ekonomi, dilakukan kajian BME sosial - ekonomi. Kajian ini dilakukan pada awal, tengah dan akhir program. Kajian pada awal dan tengah program telah dilakukan pada tahun 2005 dan 2007. Kajian sosial – ekonomi tahun 2005 (T0) bertujuan untuk melihat kondisi sosial – ekonomi masyarakat sebelum program dan kegiatan COREMAP dilakukan. Sedangkan kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2007 (T1) bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2009 dilakukan untuk mengkaji capaian pelaksanaan COREMAP, khususnya perubahan pendapatan masyarakat yang dikaitkan dengan kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA).

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T2) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Barat. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah

memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi di Desa Jago-jago dan Sitardas, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009
Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

RANGKUMAN

Kegiatan “Benefit Monitoring Evaluation Aspek Sosial-Ekonomi COREMAP” bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi, terutama tingkat pendapatan dan faktor-faktor yang berpengaruh yang menjadi salah satu indikator untuk memantau dampak COREMAP. Secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan Program COREMAP di daerah; (2) Mengkaji pemahaman masyarakat mengenai Program COREMAP; dan (3) Menggambarkan perubahan tingkat pendapatan masyarakat untuk memantau dampak Program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lokasi penelitian “Benefit Monitoring Evaluation (BME) Aspek Sosial-Ekonomi COREMAP” ini adalah Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Desa tersebut merupakan lokasi kajian “Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang” pada tahun 2005 dan 2007. Selain Desa jago-jago penelitian ini juga mengumpulkan data di Desa Sitardas yang juga merupakan lokasi COREMAP di Kecamatan Badiri. Namun demikian, di Desa Sitardas tidak dilakukan survei rumah tangga. Sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan COREMAP dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan penduduk, maka pelaksanaan kajian pada BME II survey rumah tangga dilaksanakan di lokasi yang sama pada saat pengumpulan data dasar aspek sosial terumbu karang pada tahun 2005 dan 2007.

Penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai jenis kegiatan Coremap telah dilaksanakan di Desa Jago-jago dan Sitardas, sebagaimana yang telah dirancang dalam program tersebut. Namun dari berbagai kegiatan yang direncanakan itu tidak seluruhnya dilaksanakan. Dari sekitar 13 rencana kegiatan yang pernah dilaksanakan hanya delapan kegiatan.

Namun dari delapan kegiatan yang pernah dilaksanakan itu yang masih berjalan hanya tiga kegiatan saja yakni kedai pesisir, kelompok perempuan yang mencoba kegiatan pembuatan dodol rumput laut dan kerupuk ikan, serta kegiatan budidaya ikan lele. Diantara kegiatan yang masih berjalan itu, tingkat optimalisasinya masih rendah. Hal ini karena diantara kegiatan itu masih bersifat uji coba dan yang lainnya kurang mendapatkan dukungan dari anggota, serta adanya hambatan yang bersifat teknis seperti teknik budidaya ikan lele yang mengalami banyak hambatan terutama ketersediaan air tawar yang cukup.

Berbagai masalah dan hambatan itu mempengaruhi capaian program coremap di desa itu antara lain dampaknya terhadap pendapatan rumah-tangga. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pendapatan rumah-tangga tidak mengalami kenaikan sejak adanya program coremap yakni antara tahun 2005-2009 namun sebaliknya mengalami penurunan. Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan mengalami penurunan sebesar -20,915% yakni dari Rp1.167.860,- menjadi Rp923.605,-. Sedangkan pendapatan per kapita turun sebesar -3,05% yakni dari Rp238.617,- menjadi Rp231.333,-. Penurunan pendapatan rumah-tangga penduduk desa ini juga terjadi di rumah-tangga nelayan, bahkan penurunan lebih besar. Rata-rata pendapatan rumah-tangga nelayan mengalami penurunan sebesar -54,2% (2005-2009) yakni dari Rp1.196.857,- menjadi Rp547.753,-. Sedangkan pendapatan per kapita rumah-tangga nelayan turun sebesar -51,9% yakni dari Rp217.096,- menjadi Rp104.255,-.

Faktor utama yang menyebabkan penurunan pendapatan rumah-tangga nelayan di desa ini adalah jumlah tangkapan ikan yang mengalami penurunan. Menurunnya jumlah tangkapan ikan ini sduah berlangsung lama sejak alat tangkap bagan di perairan desa itu berkurang. Nelayan sekarang banyak tergantung pada alat pancing namun jumlah ikan yang ditangkap juga tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat nelayan banyak yang beralih menjadi ABK pada juragan kapal-kapal besar di pelabuhan Sibolga.

Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang diinisiasi melalui program coremap di desa ini tidak mencapai target yang optimal sehingga kurang mampu mendukung perekonomian rumah-tangga nelayan yang sedang tertimpa krisis. Dari sekitar 13 kegiatan yang direncanakan hanya tinggal tiga kegiatan yang masih bertahan dengan kondisi capaian yang minim. Persoalan utama terletak pada pengelolaan coremap di daerah yang kurang mampu melibatkan peranserta warga masyarakat desa dalam berbagai kegiatannya. Umumnya warga desa beranggapan bahwa kegiatan coremap merupakan proyek sesaat sebagaimana proyek-proyek pembangunan lainnya. Hal ini juga disebabkan karena desa Jago-jago telah diidentikkan sebagai desa miskin yang selalu diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh bantuan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program coremap sangat sulit dikembangkan di kalangan rumah-tangga nelayan di desa ini tanpa adanya peranserta/partisipasti aktif dari kalangan mereka sendiri. Sikap kalangan nelayan yang cenderung skeptis terhadap program coremap yang disamakan dengan program pembangunan lainnya yang hanya bersifat sesaat telah menyebabkan kurangnya dukungan program itu dari kalangan warga nelayan di desa ini. Sikap skeptis yang terbentuk selama puluhan tahun akibat proyek-proyek pembangunan yang mengidentikkan mereka sebagai orang miskin merupakan menjadi hambatan terbesar dalam menjalankan program coremap di desa ini.

Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan inovasi terkait sikap dan persepsi warga terhadap proram yang sedang dilaksanakan. Inovasi itu terkait dengan sosialisasi ulang yang harus dilakukan secara interaktif sehingga mampu mempengaruhi persepsi mereka terhadap program coremap yang bersifat berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan dengan cara melibatkan kalangan warga desa yang paling berpengaruh dalam kehidupan keseharian mereka seperti peran juragan. Keberhasilan sosialisasi ulang ini akan sangat berpengaruh terhadap peranserta/partisipasi dalam kegiatan coremap berikutnya. Peranserta yang dimaksudkan harus didesain sebagai upaya untuk mendelegasikan

kewenangan program itu kepada warga masyarakat melalui suatu mekanisme pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang sudah ditunjuk dalam struktur organisasi coremap daerah. Fasilitator yang berpengalaman sangat diperlukan untuk membangkitkan peranserta warga pada arah yang benar. Untuk itu rekrutmen terhadap fasilitator di tingkat daerah sangat penting dilakukan secara ketat mengutamakan orang desa setempat yang kemudian dilatih secara intensif untuk menjadi fasilitator profesional.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
RANGKUMAN	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2.	Tujuan 4
1.3.	Metodologi 5
	1.3.1. Lokasi Penelitian 5
	1.3.2. Pengumpulan Data 5
	1.3.3. Analisa Data 9
1.4.	Pembabakan Penulisan 9
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARKAT 11
2.1.	Kegiatan Mata Pencaharian Alternatif 11
	2.1.1. Jenis Kegiatan dan Proses Pelaksanaan 11
	2.1.2. Permasalahan dan Kendala Kegiatan MPA 19
2.2.	Program Bantuan Fisik Desa 26
BAB III	PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN CAPAIAN COREMAP 29
3.1.	Perubahan Pendapatan Rumah Tangga 30
3.2.	Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan 34

3.3.	Faktor yang Berpengaruh	42
3.3.1.	Program Coremap	42
3.3.2.	Non Coremap	44
3.4.	Capaian Ekonomi Coremap	46
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	57
4.1.	Kesimpulan	57
4.2.	Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA		71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Statistik Lele Desa Jago-jago Tahun 2009	13
Tabel 2.2. Statistik Lele Desa Jago-jago Tahun 2008	14
Tabel 3.1. Statistik Pendapatan Penduduk Per Bulan dan Perubahannya 2005-2009 dan 2007-2009	31
Tabel 3.2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Kelompok Pendapatan, Desa Jago-jago, Tahun 2005	33
Tabel 3.3. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Khusus Nelayan Per Bulan dan Perubahannya 2005-2009 dan 2007-2009	34
Tabel 3.4. Distribusi pendapatan Rumah Tangga Khusus Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan, Desa Jago-jago, Tahun 2005 dan 2007	36
Tabel 3.5. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim	38
Tabel 3.6. Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan dan Musim, Desa Jago-jago Tahun 2005	41
Tabel 3.7. Tren Perubahan Pendapatan Tahun 2005, 2007, 2009	47
Tabel 3.8. Tren Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Desa Jago-jago, 2005, 2007, 2009	49
Tabel 3.9. Tren Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Menurut Musim	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ekosistem terumbu karang merupakan komponen penting dalam lingkungan laut dengan kekayaan sumberhayati yang beraneka ragam, Keanekaragaman sumberhayati dari terumbu karang memberikan banyak manfaat tidak saja secara ekologis tetapi juga secara ekonomis. Manfaat ekologis dari terumbu karang antara lain adalah karena fungsinya sebagai tempat pemijahan ikan dan biota laut lainnya, juga sebagai proteksi pantai untuk menahan ombak dan arus laut serta mengurangi abrasi pantai. Terumbu karang dan mangrove juga memberikan manfaat ekonomi misalnya perikanan dan pariwisata. Terumbu karang merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat pesisir terutama yang mempunyai matapecaharian sebagai nelayan. Oleh karenanya, kelestarian terumbu karang dijaga karena dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu untuk perikanan, keindahan terumbu karang dapat dijadikan obyek pariwisata yang jika dikelola dengan baik akan dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar. Dengan demikian, pemerintah daerah setempat juga mendapatkan manfaat karena terumbu karang dapat menjadi sumber pendapatan daerah (DKP Kabupaten Tapanuli Tengah, 2007).

Sayangnya kondisi terumbu karang di Indonesia sebagian besar rusak akibat dari bencana alam seperti pemanasan global, bencana alam, gempa tektonik, banjir, tsunami serta fenomena alam lainnya. Selain faktor alam, faktor aktivitas manusia berkontribusi paling besar terhadap kerusakan terumbu karang. Aktivitas manusia yang merusak tersebut antara lain penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, penambangan dan pengambilan karang, overfishing, pencemaran dan kegiatan pembangunan, pesisir dan hulu. Kondisi rusaknya terumbu

tentunya sangat merugikan kehidupan masyarakat pesisir dan pantai. Dengan rusaknya terumbu karang dan mangrove, fungsi-fungsi dari ekosistem penting tertumbu karang akan hilang dan tentunya memberikan dampak negative atau kerugian ekonomi yang sangat besar tidak saja bagi masyarakat pesisir tetapi juga bagi pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, kerusakan terumbu karang akan sangat berpengaruh terhadap perkenomian masyarakat setempat maupun dalam skala yang lebih luas, baik local maupun nasional.

Sebagai respon terhadap permasalahan rusaknya terumbu karang, pemerintah menyusun kebijakan pengelolaan terumbu karang yang ditujukan antara lain untuk mewujudkan pengelolaan yang seimbang antara pemanfaatan dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan dapat melindungi, mengurangi, merehabilitasi serta mencegah kerusakan yang lebih parah dari terumbu karang, sehingga kehilangan nilai ekonomis dan ekologis dapat dicegah. Program pengelolaan terumbu karang atau yang lebih dikenal dengan COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program), dikenalkan di Indonesia sejak tahun 1998/1999 dan berakhir pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2004 kegiatan Coremap dilanjutkan untuk Fase II (DKP, 2007). Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan terumbu karang di tingkat nasional dan daerah, serta melestarikan, memanfaatkan dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang, serta memfasilitasi kelompok masyarakat pengelola untuk mendapat pertambahan manfaat dan pendapatan. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan akses mata pencaharian alternative. Selain itu, program tersebut juga dilaksanakan untuk membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki fungsi pemerintahan.

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu sasaran kegiatan COREMAP II karena kabupaten ini juga mempunyai sumberdaya terumbu karang yang sangat potensial dan bernilai ekonomis tinggi.

Kenyataan menunjukkan bahwa terumbu karang di kabupaten ini sudah mengalami deplesi sebagai akibat pemanfaatan yang berlebihan. Kerusakan terumbu karang di Kabupaten Tapanuli Tengah ditengarai karena sistem pemanfaatan yang terbuka (open access) sehingga setiap orang dapat memanfaatkannya dengan bebas (DKP Kabupaten Tapanuli Tengah, 2007). Oleh karena itu, pengelolaan dan rehabilitasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah dan berakibat pada keberlanjutan perikanan pesisir.

Dalam rangka melestarikan terumbu karang tersebut, kegiatan COREMAP dilaksanakan dengan berbagai komponen yang pada dasarnya menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam merehabilitasi, melindungi dan melestarikan sumberdaya ekosistem terumbu karang. Salah satu komponen kunci COREMAP adalah pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) yang merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga di pesisir pada kabupaten program agar mampu melaksanakan kerjasama pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan pendapatan. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir dalam kerangka pengelolaan bersama perlindungan laut dan daerah perlindungan laut (DPL). (Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, 2007). PBM dilaksanakan dengan menggabungkan aspek teknis pengelolaan dan aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan program di lapangan, terdapat sinergi yang baik antar petugas pelaksana di lapangan maupun antara petugas lapangan dengan manajemen proyek di pusat dan daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan PBM menggunakan prinsip-prinsip yang meliputi antara lain keberpihakan pada masyarakat miskin di pesisir dan kepulauan, keterbukaan, desentralisasi, pemberdayaan, partisipasi pemangku kepentingan, pemerataan, berkelanjutan dan ketesetaraan jender (DKP, 2007). Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, kegiatan PBM di Kabupaten Tapanuli Tengah dimulai dengan

kegiatan sosialisai program, pembentukan lembaga-lembaga pendukung dan peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan konservasi laut dan dukungan bagi taman laut di tingkat kabupaten. Salah satu target dari kegiatan COREMAP adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan indikator pencapaian pendapatan per kapita sebesar 2 persen per tahun, maka perlu dilakukan suatu kegiatan untuk mengetahui dampak dari COREMAP tersebut, khususnya dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat mengetahui berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan program sehingga dapat segera dicarikan jalan keluar agar program dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan.

Evaluasi keberhasilan COREMAP II dari aspek sosial-ekonomi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan survei Benefit, Monitoring Evaluation (BME). Survei BME sosial ekonomi dilakukan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi (Widayatun, dkk, 2006). Data dan informasi tentang pendapatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil BME dibandingkan dengan data pendapatan yang telah dikumpulkan pada *baseline* studi sosial-ekonomi. Dengan demikian maka dampak COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dipantau dari hasil perbandingan. Kegiatan BME sosial-ekonomi dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun program, sehingga dapat dipergunakan untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program di tingkat lokasi, kabupaten, maupun nasional.

1.2. TUJUAN

Secara umum tujuan kajian "Benefit Monitoring Evaluation Aspek Sosial-Ekonomi COREMAP" adalah untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi, terutama tingkat pendapatan dan faktor-faktor yang berpengaruh yang menjadi salah satu indikator untuk memantau dampak COREMAP. Secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan Program COREMAP di daerah
2. Mengkaji pemahaman masyarakat mengenai Program COREMAP
3. Menggambarkan perubahan tingkat pendapatan masyarakat untuk memantau dampak Program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat

1.3. METODOLOGI

1.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian "Benefit Monitoring Evaluation (BME) Aspek Sosial-Ekonomi COREMAP" ini adalah Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Desa tersebut merupakan lokasi kajian "Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang" pada tahun 2005. Selain Desa jago-jago penelitian ini juga mengumpulkan data di Desa Sitardas yang juga merupakan lokasi COREMAP di Kecamatan Badiri. Namun demikian, di Desa Sitardas tidak dilakukan survei rumah tangga. Sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan COREMAP dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan penduduk, maka pelaksanaan kajian pada BME II survey rumah tangga dilaksanakan di lokasi yang sama pada saat pengumpulan data dasar aspek sosial terumbu karang pada tahun 2005 dan 2007.

1.3.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 100 rumah tangga terpilih dengan menggunakan kuesioner berstruktur. Rumah tangga sampel adalah rumah tangga yang disurvei pada tahun 2007, namun demikian sebanyak 5 rumah tangga sampel harus diganti karena alasan pindah ke desa dan kabupaten lain, atau tidak ada di tempat selama survei

dilakukan. Pemilihan rumah tangga pengganti diupayakan mengacu pada nama-nama yang sudah tercatat sebelumnya, terutama yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang hampir sama. Jika tidak ditemukan terpaksa dipilih rumah tangga yang bertempat tinggal berdekatan dengan rumah tangga sampel yang diganti. Data yang diperoleh melalui kuesiner terdiri dari dua kategori, yaitu rumah tangga dan individu. Oleh karena itu, respondennya meliputi responden rumah tangga dan individu. Responden untuk pertanyaan rumah tangga adalah kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang dapat mewakili, misalnya isteri atau anggota rumah tangga dewasa yang mengetahui kehidupan rumah tangga bersangkutan. Sementara untuk pertanyaan individu, responden dipilih secara acak dari anggota rumah tangga dewasa (berumur lebih dari 15 tahun ke atas) dan berada di tempat pada saat wawancara serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Data rumah tangga yang dikumpulkan meliputi keterangan anggota rumah tangga dan kondisi ekonomi rumah tangga. Informasi tentang rumah tangga antara lain meliputi jumlah anggota rumah tangga, hubungan dengan KRT, komposisi umur dan jenis kelamin, pendidikan, status kegiatan ekonomi dan pekerjaan anggota rumah tangga berusia 10 tahun ke atas. Data kondisi ekonomi rumah tangga yang dikumpulkan mencakup variabel pendapatan, pemilikan aset produktif dan barang berharga yang dimiliki rumah tangga. Data sejenis pernah diajukan pada survei tahun 2007, sehingga dapat dipakai untuk mengetahui perubahan pendapatan dari rumah tangga yang bersangkutan. Data individu meliputi pengetahuan dan partisipasi dalam Program COREMAP. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain pengetahuan tentang COREMAP, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan keterlibatan serta pendapat mereka tentang dampak COREMAP terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk pengumpulan data kuantitatif, peneliti dibantu oleh 5 orang pewawancara yang dipilih dari masyarakat setempat. Mereka umumnya berpendidikan SLTA ke atas (dua di antaranya pernah kuliah sampai

semester 5 di perguruan tinggi). Mereka adalah para pewawancara yang membantu peneliti ketika survei BME aspek sosial ekonomi tahun 2007. Dengan demikian diharapkan bahwa mereka akan dapat menggali informasi dengan baik.

Data yang dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif adalah data atau informasi yang tidak dapat diperoleh melalui kegiatan survei. Data tersebut mencakup aspek terkait dengan program dan kegiatan pengelolaan terumbu karang dan sumberdaya laut, produksi SDL, lokasi dan wilayah penangkapan SDL, pemasaran, kondisi daerah dan degradasi lingkungan serta faktor-faktor yang berpengaruh. Pengumpulan data kualitatif dilakukan sendiri oleh peneliti melalui berbagai pendekatan kualitatif yaitu wawancara mendalam, diskusi terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), dan observasi (pengamatan).

- Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap beberapa informan kunci yang dipilih secara purposive. Informan di tingkat desa adalah ketua dan anggota kelompok masyarakat (Pokmas), Ketua Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM), motivator, fasilitator, koordinator fasilitator, pemuka masyarakat (formal maupun informal), nelayan, dan anggota masyarakat lain yang diperkirakan mengetahui tentang pengelolaan terumbu karang dan atau yang terlibat dengan kegiatan COREMAP. Informan kunci yang berhasil diwawancarai di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah adalah dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan koordinator dan anggota komponen-komponen COREMAP Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk pemilihan informan diperoleh dengan cara *snowballing* artinya, informan diperoleh berdasarkan informasi dari informan sebelumnya untuk memperkaya informasi yang terkumpul.
- FGD dilakukan dengan sekelompok nelayan dalam kegiatan COREMAP. Selain itu, FGD juga dilakukan terhadap beberapa orang yang terlibat sebagai fasilitator lapangan, motivator, Ketua Pokmas, dan LKM. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang yang

memiliki latar belakang sosial ekonomi yang setara. Diskusi ditekankan pada aspek yang berkaitan dengan potensi sumber daya laut, khususnya terumbu karang serta kegiatan terkait dengan mata pencaharian alternatif, kendala dan alternatif pemecahan masalah. Diskusi dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Observasi (pengamatan lapangan) dilakukan untuk lebih memahami secara komprehensif keadaan desa maupun permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut, khususnya terumbu karang. Pengamatan dilakukan di sekitar pemukiman, sekitar desa, dan di pantai untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman tentang keadaan lokasi penelitian dan masyarakat dalam konteksnya dengan pengelolaan sumber daya laut dan terumbu karang.
- Penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan kegiatan *desk review* terhadap hasil penelitian/kajian sebelumnya, kebijakan/program terkait dengan program COREMAP, dan bahan-bahan dokumentasi lain yang relevan. Jenis data sekunder lain berasal dari publikasi tentang kondisi terumbu karang dan pengelolaannya yang menganut prinsip pengelolaan berbasis masyarakat. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti Bappeda, Kantor Statistik, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tapanuli Tengah, serta dari berbagai publikasi yang terkait.

Dalam pengumpulan data, baik melalui survei maupun dengan pendekatan kualitatif tidak ditemui kendala yang cukup berarti. Masyarakat Jago-jago yang relatif homogen dilihat dari suku dan aktivitasnya serta lokasi permukiman yang mengelompok memudahkan dalam pengumpulan data. Penelitian dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2009 kebetulan pada saat musim ombak keras sehingga banyak nelayan yang tidak melaut. Dengan demikian pengumpulan data dapat dilaksanakan relatif cepat karena pada nelayan mudah ditemui

baik pada siang maupun malam hari. Namun demikian, dalam melaksanakan penelitian ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah:

- Keterbatasan data sekunder terutama di tingkat desa. Data yang tersedia khususnya data kependudukan hanya terbatas pada informasi yang terpampang di papan tulis di Pondok Informasi dan merupakan data lama.
- Kelemahan data tentang pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Ada kecenderungan masyarakat (responden) untuk mengecilkan pendapatan dan membesarkan jumlah pengeluaran rumah tangga. Kelemahan tersebut dapat dikurangi dengan melakukan pendalaman terhadap beberapa responden.

1.3.3. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan penekanan pada analisa deskriptif yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil survei dianalisa dengan menggunakan tabulasi silang untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan, data kualitatif dianalisa dengan teknik analisa isi (*content analysis*). Data kualitatif ini digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang isu-isu pokok penelitian. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang utuh mengenai masyarakat nelayan Desa Jago-jago, baik mengenai kondisi sosial ekonomi dan budayanya, pengelolaan sumber daya laut serta isu-isu yang muncul berkenaan dengan pengelolaan sumber daya laut, khususnya terumbu karang.

1.4. PEMBABAKAN PENULISAN

Penulisan hasil penelitian mengenai "Laporan Benefit, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan COREMAP Di Desa Jago-jago" dibagi ke dalam empat bab. Bab I (pertama) adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian dan metode penelitian, dan pembabakan

penulisan. Bab II (dua) pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. Bab selanjutnya (Bab III) lebih menekankan pada analisa tentang perubahan pendapatan dan capaian COREMAP. Bab IV (empat) berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan terumbu karang yang sesuai dengan sasaran dan tujuan COREMAP.



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

2.1. KEGIATAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF

Kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA) merupakan salah satu kegiatan COREMAP yang diharapkan dapat membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan demikian kegiatan MPA diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kegiatan masyarakat di lokasi terumbu karang sehingga dapat mencegah kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat. Kegiatan MPA diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mampu mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

2.1.1. Jenis Kegiatan dan Proses Pelaksanaan

Pada awalnya jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program MPA di Desa Jago-Jago adalah pengembangan itik petelor, penanaman kepiting bakau, pembesaran dan pembenihan ikan lele. Pemilihan item kegiatan MPA berasal dari masing-masing anggota kelompok. Selain itu, pada awal pembentukan kelompok, masyarakat mengajukan proposal untuk pembesaran ikan kerapu, namun usulan tersebut akhirnya diganti karena kondisi lingkungan (air) yang tidak memungkinkan. Namun demikian, karena ada beberapa masalah seperti ketidakcocokan lahan. Maka pengembangan itik petelor dan budidaya kepiting bakau tidak berlangsung lama. Sebagai gantinya maka kegiatan MPA yang ada adalah kedai pesisir. Dengan demikian maka jenis kegiatan MPA yang dilaksanakan di Desa Jago-jago adalah pengembangan budidaya lele, pengolahan hasil (pembuatan kerupuk ikan dan kerupuk udang),

diversifikasi pengolahan hasil rumput laut. Kegiatan MPA terutama dilakukan oleh anggota Pokmas, yang sesuai dengan kegiatan masing-masing. Misalnya, usaha pengembangan budidaya ikan lele dumbo dilakukan oleh kelompok lele. Pokmas yang melaksanakan kegiatan ini dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa no 11/SK/KDJ//XII/208 (COREMAP II Kabupaten Tapanuli Tengah).

Kelembagaan COREMAP tingkat desa di koordinasikan oleh LPSTK. Lembaga ini membawahi 5 kelompok masyarakat (Pokmas) secara formal. Setiap Pokmas terdiri dari kelompok kecil yang dibentuk untuk memperoleh bantuan, seperti kelompok berdasarkan paket, contohnya paket pengasapan lele. Namun demikian bantuan kepada kelompok dibagi untuk individu, dengan aturan sharing kepada pokmas dan LPSTK. Pembagian sharing hasil yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut: LPSTK memperoleh 15%, pokmas 15%, simpanan untuk dana bergulir 5%, dan keuntungan untuk pengelola 65%.

Kebanyakan kegiatan yang masih berjalan dan diminta oleh masyarakat berkaitan dengan Mata Pencapaian Alternatif (MPA) yang dikelola oleh Pokmas UEP. Namun demikian Pokmas lain yang bukan termasuk UEP juga menginginkan bantuan pendanaan yang bersumber dari MPA. Dengan demikian kegiatan MPA di desa ini telah tersebar ke berbagai kelompok usaha masyarakat yang dibentuk melalui program Coremap.

Kegiatan MPA yang berupa pembesaran ikan lele sangat potensial mengingat Desa Jago-jago memiliki struktur tanah liat berpasir dan sumber air relatif mudah didapat. Selain itu pemilihan kegiatan pembesaran ikan lele didasari atas pertimbangan bahwa lele dumbo dapat hidup pada kondisi air yang kualitasnya rendah, pertumbuhannya sangat cepat, serta tersedia banyak ikan rucuh-rucuh untuk makanan lele tersebut. Selain itu, dari pembesaran ikan lele dumbo ini cukup menjanjikan karena jika harga murah sementara produk melimpah maka ikan lele dumbo akan diolah (disale/diasap) oleh ibu-ibu. Dengan demikian kaum perempuan di Desa jago-jago dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Kegiatan pembesaran ikan lele dumbo ini

adalah untuk mengurangi kegiatan masyarakat di lokasi terumbu karang (COREMAP II Kabupaten Tapanuli Tengah, 2008).

Tabel 2.1. Statistik Lele Desa Jago-jago Tahun 2009

No	Nama	Jml Kolam	Jml Bibit	Thn Tanam	Tahap	Panen	Masalah	Mati	Sisa
1	Rahman	2	3000	04/09	I	07/09	Bibit mati	100	-
2	Batee	2	3000	04/09	I	07/09	Air tidak ada gantinya	2500	-
3	Aswaludin	1	1500	04/09	I	07/09	Bibit mati	100	-
4	Marwaji	1	1000	04/09	III				
5	Ali	2	3000	04/09	I	07/09	Mati krn di pinggir pantai		Sisa 1/2
6	Yudi	2	3000	04/09	I	07/09	Bibit mati	100	
7	Safrinul	2	2500	04/09	II				
8	Nizham	3	3500	04/09	III		Mati di makan elang		Sisa 1 kolam

Sumber : Fasilitator Desa

Kegiatan MPA yang berupa ternak lele masih dijalankan, sebanyak 15 orang pernah melakukan usaha budidaya ternak lele ini namun lama usaha mereka bervariasi antara 1 tahun sampai dua bulan. Semua modal untuk beternak lele awalnya diberi oleh fasilitator desa dan fasilitator lele melalui program coremap yakni bahan untuk membuat kolam lele seluas 3x6 meter dan kedalaman kolam sekitar 80 cm, bibit lele, dan pakan dengan dibantu seorang fasilitator tingkat desa. Peralatan yang diberikan untuk pengadaan kolam ikan lele antara lain terpal, papan, jaring, atap rumbia. Pada awal kegiatan diberikan sebanyak 1500 ekor bibit lele pada masing-masing rumah tangga yang akan melaksanakan budidaya tersebut. Selain itu, mereka juga diberikan pelet (makanan lele) sebanyak 3 karung. Satu karung berisi sekitar 75 kilogram, dan satu kolam membutuhkan sekitar 75 kilogram pelet. Dana atap dan bangunan sebanyak Rp400 ribu untuk 2 kolam. Dalam tiga bulan bibit

lele tersebut sudah dapat dipanen. Sesudah panen diharapkan usaha ternak lele ini bisa dilanjutkan dengan modal yang sudah diperoleh dengan dibantu bibit atau pakan. Meskipun peralatan untuk budidaya sudah diberikan tidak semua nelayan mau mengerjakan karena merasa ribet kalau harus memberi makan lele setiap hari.

Tabel 2.2. Statistik Lele Desa Jago-jago Tahun 2008

No	Tanggal Panen	Nama	Jumlah Panen	Kelanjutan
1	17/05/08	Samsul	101 kg	Berhenti krn kolam rusak
2	29/05/08	Nizham	73 kg	Berlanjut
3	06/06/08	Marwaji	69 kg	Berlanjut
4	12/06/08	Gullit	71 kg	Berhenti krn kolam rusak
5	26/06/08		90 kg	
6			41 kg	
7			17 kg	
8			4 kg	
9	07/07/08		82 kg	
10	30/07/08	Nasradi	63 kg	
11	08/08/08	Maslah	51 kg	
12			48 kg	
13			20 kg	

Sumber : Fasilitator Desa

Pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya ikan lele juga disediakan supervisor. Supervisor tersebut bertugas untuk mendampingi usaha pengembangan budidaya ikan lele sehingga usaha tersebut dapat berkembang dengan baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Keterlibatan supervisor dimulai dari pembuatan kolam dan pemberian pelatihan cara penanganan bibit. Pendampingan supervisor ini dilakukan selama empat tahun.

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas, artinya tidak semua anggota akan terlibat program. Menurut pengurus LPSTK yang dipilih untuk melaksanakan program

tahap awal, khususnya MPA, adalah mereka yang dianggap mau dan bisa melaksanakannya. Namun keputusan ini menimbulkan permasalahan di masyarakat, khususnya di dalam anggota kelompok Pokmas. Ada yang beranggapan, bahwa mereka yang terlibat dalam beberapa program yang dilaksanakan di Desa Jago-Jago adalah orang yang sama atau dari anggota keluarga yang "itu-itu saja". Misalnya kegiatan MPA budidaya ikan lele diikuti oleh kepala keluarga. Pada tahap awal pelaksana program masih terbatas, yang artinya tidak semua anggota. Misalnya kegiatan MPA budidaya ikan lele diikuti oleh kepala keluarga, sementara MPA pengolahan krupuk ikan dilaksanakan istri atau anak perempuannya anggota Pokmas perempuan. Situasi ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat karena mereka ada juga yang menginginkannya. Dampak dari rasa ketidakadilan ini munculnya rasa antipati dan tidak ingin mendukung kegiatan COREMAP. Hal ini tentu merupakan kendala lain untuk keberlanjutan program COREMAP ke depan untuk desa ini. Dalam hal ini, pengurus daerah (PIU) mengemukakan bahwa permasalahan ini akan diatasi dengan membentuk kelompok-kelompok baru, namun jika kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokmas menunjukkan keberhasilan.

Kegiatan lain yang pernah dilakukan adalah ternak kambing dan ternak bebek, namun keduanya sudah tidak berjalan sekarang. Menurut penuturan penduduk desa, bebek yang dipelihara di desa itu mengalami stress sehingga tidak bertelur. Sedangkan kambing yang pernah dipelihara tidak diberi makan yang cukup karena di desa itu tidak terdapat persediaan rumput dan dedaunan yang cukup untuk pakan ternak.

Pada kelompok perempuan ada rencana pengasapan lele namun belum pernah berjalan. Rencana pengasapan lele akan berjalan kalau sudah ada panen dari petani lele namun sementara ini belum ada panen lele yang dianggap cukup banyak untuk dapat diolah melalui teknik pengasapan yang menguntungkan. Jumlah lele yang banyak diperlukan

agar pengasapan tidak rugi karena prosesnya dianggap rumit dan banyak membutuhkan modal usaha.

Sementara ini kelompok yang berjalan adalah kelompok perempuan pembuat dodol rumput laut dan kerupuk ikan. Tujuan dari pemilihan kegiatan pengolahan kerupuk ikan dan kerupuk udang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa produk ikan dan udang mudah ditemukan. Di samping itu, hasil perikanan produk olahan tersebut harganya relatif murah sehingga dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Kegiatan ini dianggap cocok untuk dilaksanakan di Desa Jago-jago mengingat adanya keinginan masyarakat untuk mengembangkan usaha tersebut dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan. Hasil dari pembuatan kerupuk ikan dan kerupuk udang tersebut diharapkan dapat dipasarkan di dalam maupun di luar Desa Jago-jago.

Pelaksana dari kegiatan pembuatan kerupuk ikan dan kerupuk udang adalah Pokmas Perempuan Pembuat Kerupuk yang disahkan oleh Kepala Desa Jago-jago dengan Surat Keputusan No 09/SK/KDJ/XII/2008. Untuk kegiatan pembuatan kerupuk ikan dan udang ini ada lima kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari lima sampai tujuh orang. Semua anggota Pokmas yang terlibat dalam kegiatan ini semuanya adalah perempuan.

Adapun proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembentukan kelompok, kemudian pengadaan bahan dan alat dilaksanakan pada saat pencairan dana tahap pertama. Alat-alat tersebut terdiri dari 16 item antara lain kualiti, kompor, baskom, dandang, dan blender. Sementara bahan yang akan diolah seperti tepung, udang, soda kue, dll pengadaannya menyusul.

Pelaksanaan pembuatan kerupuk ikan dan kerupuk udang didampingi oleh seorang supervisor agar dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kualitas produk yang dihasilkan dapat terjaga. Selain itu, sasaran pasar yang akan dicapai, jumlah konsumen dan peminat produk yang dihasilkan merupakan salah satu tanggung jawab dari supervisor yang melakukan pendampingan tersebut.

Selain pembuatan kerupuk ikan, kegiatan MPA lainnya adalah diversifikasi pengolahan hasil rumput laut. Kegiatan ini berupa pengolahan hasil rumput laut menjadi dodol. Pemilihan jenis kegiatan ini dikarenakan semakin banyaknya komoditas rumput laut sebagai hasil pengembangan budidaya yang dilakukan di sekitar Desa Jago-jago, yaitu di Desa Sitardas.

Pelaksana dari kegiatan diversifikasi pengolahan rumput laut adalah Pokmas Pengolahan Rumput Laut dengan 9 orang pengurus. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa kelompok perempuan. Satu kelompok terdiri dari lima - tujuh orang. Sebelum kegiatan diversifikasi pengolahan hasil rumput laut, para anggota kelompok dikumpulkan dan diadakan pelatihan oleh supervisor untuk mendapat bimbingan dan arahan teknis tentang cara kerja pembuatan berbagai produk olahan dari rumput laut. Selanjutnya, setiap kelompok diberi modal awal sebanyak Rp500.000.

Pelaksanaan kegiatan diversifikasi pengolahan hasil rumput laut dimulai dengan pengadaan bahan dan alat-alat yang terdiri dari 30 item, antara lain kompor, tangki perebusan gula, tangki pencampuran, blender dan ember. Untuk mengembangkan usaha ini ada seorang supervisor yang bertugas dalam pendampingan pengembangan usaha yang dihasilkan seperti dodol, permen, agar-agar dan es rumput laut yang siap dipasarkan. Pendampingan juga diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pasar, jumlah konsumen serta peminat produk. Ada tiga kelompok perempuan yang sama-sama membuat dodol rumput laut dan kerupuk ikan. Ketiga kelompok ini memperoleh bantuan modal usaha untuk membeli bahan pembuatan dodol rumput laut untuk dipraktikkan lalu hasilnya dibawa oleh fasilitator coremap tingkat desa untuk dijual. Penjualan dilakukan di sebuah counter kecil di kantor LSM yang bekerjasama dengan kegiatan coremap.

Kegiatan MPA lainnya adalah pengelolaan Kedai Pesisir. Kegiatan MPA yang berupa kedai pesisir diawali pada adanya keprihatinan terhadap rendahnya pendapatan rata-rata masyarakat di Desa Jago-jago yang berkisar Rp. 350.000 per bulan. Padahal biaya hidup di Desa Jago-jago sekitar Rp. 300.000 – Rp. 600.000 belum termasuk biaya sosial untuk

kegiatan adat dan serikat tolong menolong yang mencapai Rp.10.000 per bulan. Selain itu, ketiadaan pasar di Desa Jago-jago mengharuskan masyarakat Jago-jago harus pergi ke desa lain untuk belanja seperti ke Desa Hutabalang, Hajoran atau ke Pinang Sori.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka dirintis sebuah kedai yang sekaligus sebagai grosir untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari, kebutuhan nelayan, dan kebutuhan petani. Diharapkan dengan adanya kegiatan kedai pesisir ini masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk belanja keluar desa. Selain itu, dengan adanya aktivitas ini masyarakat diharapkan tidak lagi berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan terumbu karang.

Harga barang-barang yang dijual di kedai pesisir relatif sama dengan harga barang yang dijual di Sibolga. Hal ini ditujukan agar pemilik warung di Desa Jago-jago dapat membeli barang (kulakan) dari kedai pesisir tersebut untuk dijual kembali pada warga di sekitarnya. Namun demikian, hasil wawancara dengan beberapa pemilik warung kecil di Desa Jago-jago diperoleh informasi bahwa sebagian pedagang tidak mau membeli barang di kedai pesisir tersebut dan lebih senang untuk membeli barang untuk dijual kembali dari pasar Hutabalang atau Hajoran karena mereka dapat membayar belakangan (hutang). Hal ini tidak dapat dilaksanakan di kedai pesisir. Di kedai tersebut tidak diperbolehkan hutang agar perputaran modal berjalan dengan baik.

Pelaksana kegiatan kredit pesisir adalah mereka yang tergabung dalam Pokmas Serba Usaha yang jumlahnya cukup besar sekitar 25 orang dan sebagian besar laki-laki. Modal awal yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini cukup besar. Hal ini dikarenakan bahan dan alat yang diperlukan juga sangat besar. Menurut seorang informan di Desa Jago-jago untuk mengawali kegiatan usaha kredit pesisir ini memerlukan biaya sekitar Rp. 90 juta yang digunakan untuk membangun kedai maupun membeli barang-barang yang akan diperdagangkan.

Pelaksana harian kegiatan kedai pesisir adalah seorang perempuan muda yang dipilih dari desa setempat. Dia berlaku sebagai sekretaris

sekalian menjadi bendahara yang mengurus administrasi untuk mendokumentasikan pengaturan keluar masuknya barang serta pemasukan dan pengeluaran dari kedai tersebut. Untuk pekerjaan tersebut masyarakat terpilih dari beberapa kelompok masyarakat.

Di desa itu juga pernah dibuat fasilitas radio komunitas yang dibangun oleh coremap tetapi saat penelitian komputernya rusak. Radio komunitas dijalankan oleh warga desa yang menjadi anggota kelompok yang berfungsi untuk menyampaikan informasi terkait program coremap. Namun demikian kerusakan komputer telah menghentikan siaran radio komunitas dalam waktu yang cukup lama karena tidak diperbaiki.

2.1.2. Permasalahan dan Kendala Kegiatan MPA

Usaha MPA yang masih berjalan sampai sekarang adalah ternak lele. Namun usaha ini juga kurang berkembang dengan baik. Banyak anggota MPA lele ini yang berguguran. Permasalahan dan kendala yang dialami usaha ternak lele ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Air tawar untuk kolam lele kurang dan sangat terbatas sehingga air kolam tidak bisa diganti atau dialirkan dan mengakibatkan pergantian air kolam sulit dilakukan. Air bersih hanya ada di gunung dan lebih utama digunakan untuk rumah-tangga desa. Pada musim kemarau terlebih lagi tidak ada air gunung, sementara itu air sumur sangat terbatas.
2. Kolam lele tidak bisa digali di tanah karena jenis tanah rawa-rawa sehingga air akan langsung terserap habis di dalam tanah. Sebagai alternatifnya kolam dibuat diatas tanah dengan menggunakan terpal plastik. Tetapi teknik ini mengalami kebocoran sehingga air kolam terpal cepat susut sementara itu untuk pakan lele menjadi tergantung pada pakan buatan yakni pelet.
3. Nelayan tidak bisa memelihara lele secara teratur seperti memberi pakan, memberersihkan kolam, mengatur sirkulasi air dan menjaga keamanan lele karena harus melaut. Pada saat

penelitian dilakukan, nelayan di desa itu banyak yang berubah statusnya menjadi ABK di Sibolga sehingga kerja di laut bisa mencapai satu bulan.

4. Minat nelayan untuk mengusahakan ternak lele masih rendah karena budidaya ini sama sekali baru. Selain itu lele belum menjadi makanan utama karena ikan yang digemari keluarga adalah ikan laut.
5. Lele banyak yang mati karena terserang penyakit dan hama burung elang
6. Harga lele Rp13.000,- per kg tidak sepadan dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memelihara kolam lele karena selama tiga bulan panen lele hanya memperoleh untung sekitar Rp300.000,-. Sementara itu usaha pengasapan lele yang akan dilakukan oleh kelompok perempuan yang dimaksudkan untuk menampung panen lele ini belum berjalan.
7. Harga lele asappun juga tidak menarik karena harga sesudah diasap Rp40.000,- per kg (kelompok perempuan) tidak memberikan untung jika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk melakukan pengasapan. Harga akan memberikan keuntungan jika mencapai Rp60.000,- tetapi jika dijual dengan harga itu tidak ada yang membelinya, karena harga Rp40.000,- adalah harga pasar yang ditentukan di daerah Padang Sidempuan.

Sedangkan permasalahan dan kendala pada usaha Kedai Pesisir antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan kedai pesisir tidak transparan, usulan kedai pesisir berasal dari rapat anggota Kelompok Usaha Bersama tetapi dalam pelaksanaannya, pembuatan kedai dilakukan melalui tender yang tidak terbuka. Masalah ini dipandang anggotas sebagai penentuan sepihak sehingga pelaksanaan kedai pesisir sekarang tidak didukung oleh anggotanya.

2. Anggota kelompok usaha bersama tidak ada yang terlibat dalam pengelolaan kedai. Kedai pesisir diurus oleh satu orang yang bukan berasal dari anggota tetapi orang lain yang ditunjuk oleh ketua yang masih merupakan kerabat dekat ketua. Satu orang pengurus ini menjadi satu-satunya karyawan kedai yang diberi upah setiap bulannya.
3. Pengelolaan uang kedai tidak jelas sehingga keuntungan yang diperoleh kedai pesisir sekitar Rp600.000,- per bulan yang berasal dari penjualan grosir dan eceran juga tidak diketahui oleh anggotanya. Ketidakterbukaan ini telah menimbulkan kecurigaan yang berlebihan di kalangan anggota seperti penyalahgunaan keuntungan oleh ketua.
4. Penunjukan pengurus kedai yakni kerabat dekat ketua itu dipandang tidak dilakukan melalui rapat anggota, sehingga pembentukan pengurus kedai juga dipandang tidak transparan.
5. Pembentukan kedai pesisir oleh sebagian masyarakat justru dipandang akan mematikan warung-warung tradisional yang sebelumnya sudah berjalan di desa itu. Namun demikian gagasan kedai pesisir adalah grosir barang-barang kebutuhan sehari-hari sehingga menurut ketuanya tidak akan bersaing dan mematikan warung-warung tradisional penduduk setempat.
6. Pelanggan warung tidak mau pindah ke kedai pesisir karena di warung mereka bisa hutang sedangkan di kedai pesisir pembelian harus dibayar dengan cara lunas. Sistem hutang yang diterapkan pada warung ini telah membantu keluarga nelayan yang tidak selalu memegang uang cash setiap harinya tergantung hasil ikan dari laut sehingga sistem ini dipandang lebih membantu keluarga miskin daripada sistem yang diterapkan di kedai pesisir.

Sementara itu untuk jenis usaha lain yakni dodol rumput laut, permasalahan dan kendala utamanya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pasarnya belum terbentuk, sejauh ini penjualan dodol dilakukan oleh fasilitator desa dengan cara dititipkan di counter sebuah kantor LSM serta dipasarkan *door to door* di kalangan pegawai pemerintah setempat khususnya pegawai dinas kelautan dan perikanan. Usaha ini sangat terbatas sehingga produksi dodol masih sebatas uji coba dan belum diproduksi secara besar-besaran.
2. Hasil pembuatan dodol rumput laut bervariasi antar kelompok. Ada yang hasilnya bagus tetapi ada juga yang kurang bagus. Selain dari rasa itu, dodol juga belum memiliki kemasan yang menarik. Se jauh ini kemasan dibuat dengan sangat sederhana yakni dari plastik yang diikat sehingga kurang menarik pembeli.
3. Usaha dodol terganjal ijin usaha dagang untuk sampai pada pemasaran. Kelompok perempuan yang tergabung dalam UEP tidak memiliki kapasitas untuk mengurus perijinan sementara fasilitator desa belum merasa perlu membuat ijin karena pemasaran masih sangat terbatas.
4. Budidaya rumput laut sebagai bahan dasar dodol juga masih terbatas dilakukan di Sitardas, sementara di jago-jago tidak bisa dikembangkan budidaya rumput laut karena kondisi lautnya yang tidak cocok. Dengan demikian terdapat ketergantungan bahan dasar dodol rumput laut kepada petani di Sitardas.

Selain permasalahan dan kendala diatas, masih terdapat permasalahan lain yang tercermin dari protes warga yang hanya disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Protes ini disampaikan secara umum pada pelaksanaan program coremap di tingkat desa. Diantara isi protes itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Program coremap hanya dijalankan oleh ketua LPS-TK sementara anggotanya tidak ada yang terlibat. Pesan yang ingin disampaikan dalam protes ini adalah bahwa program coremap kurang memperhatikan partisipasi warga masyarakat desa sehingga berbagai program yang dijalankan selama ini kurang

memperoleh dukungan dari kalangan warga desa dan hanya dijalankan oleh ketuanya saja.

2. Program ternak lele hanya dijalankan oleh fasilitator desa dan fasilitator lele yang dikontrak oleh LPS-TK, sedangkan masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan bahan dan rencananya. Mereka hanya menerima bahan dan bibit lele seperti pemberian, bukan modal untuk usaha.
3. Pembuatan dodol rumput laut dan kerupuk ikan juga dijalankan oleh fasilitator desa, sementara masyarakat hanya tahu membuat atau memproduksi saja, tidak diikutsertakan dalam rencana dan belanja bahannya.
4. Hampir semua program berjalan elitis atau tidak memberi tempat terhadap partisipasi warga desa khususnya yang menjadi anggota kelompok. Berbagai program sejauh ini hanya diketahui oleh ketua LPSTK dan fasilitator desa sehingga dua orang itu dianggap elitis di desa itu.

Sampai dengan tahun 2009 terdapat 16 rencana program coremap di desa itu dengan berbagai jenis namun yang pernah dilakukan hanya sekitar 10 program saja tetapi itupun banyak yang mengalami kegagalan. Sampai saat ini yang masih bertahan hanya program MPA budidaya lele, kedai pesisir, dodol rumput laut dan kerupuk ikan.

Banyak warga desa yang mengatakan bahwa coremap tidak memberi manfaat pada ekonomi rumah-tangga mereka karena selain banyak program yang gagal juga karena pelaksanaan program itu dijalankan secara elitis. Program yang masih bertahan yakni budidaya ikan lele hanya dilakukan oleh 8 orang, kedai pesisir hanya diurus oleh 1 orang, dodol rumput laut dan kerupuk udang hanya diuji coba oleh 3 kelompok perempuan tetapi yang terlibat dalam satu kelompok hanya 1 sampai 2 orang sehingga praktis hanya beberapa orang saja yang terlibat dalam program coremap secara keseluruhan di desa itu.

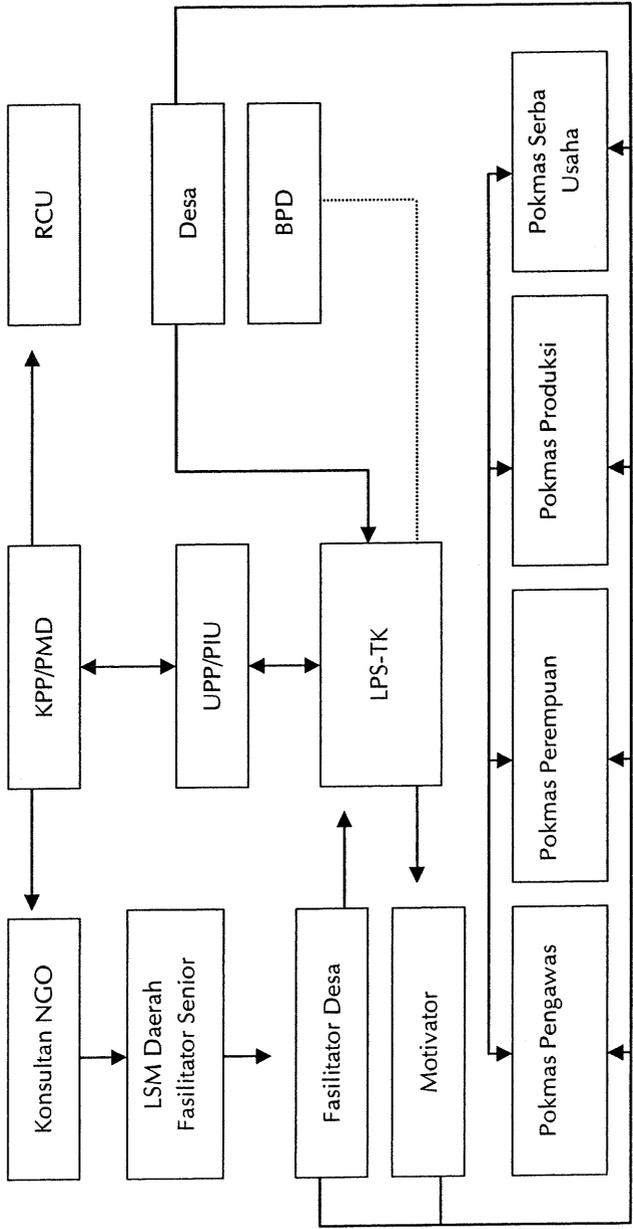
Sementara itu masyarakat sudah sejak lama hidup sebagai nelayan, dan bekerja mengupas daun nipah sebagai bahan kertas rokok tradisional

yang dikirim ke daerah Sumatera Barat. Walaupun hasil pendapatan mengupas daun nipah ini relatif kecil namun mata pencaharian ini ditekuni warga desa selama puluhan tahun sampai sekarang. Upaya coremap memberikan MPA belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan selama 5 tahun terakhir belum memberikan manfaat yang berkesinambungan dan dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah.

Skema di bawah ini menggambarkan struktur organisasi coremap di daerah khususnya Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabuoaten Tapanuli Tengah. Pada skema itu terlihat posisi LPS-TK sangat sentral dalam menjalankan program coremap secara keseluruhan. Namun demikian dengan kondisi LPS-TK yang macet sebagaimana dijelaskan dimuka akan mempengaruhi keseluruhan kegiatan coremap di daerah itu. Berdasarkan penelitian ini setidaknya diketahui dua kelemahan organisasi coremap di Desa Jago-jago. Pertama, struktur organisasi coremap di desa Jago-jago terkesan formalitas dan menjadi kaku. Operasional struktur organisasi ini pada kenyataannya sangat tergantung dari para aktor yang menjalankan kegiatan atau program setiap harinya. Sementara itu, aktor utama coremap di desa Jago-jago yang diperankan oleh ketua LPS-TK terjebak dalam formalitas dan kekakuan sehingga relasi yang terbangun diantara pengurus menjadi sangat minim. Dalam hal ini ketua LPS-TK tidak mampu menggerakkan kapasitas yang dimilikinya namun sebaliknya terjerat jaring-jaring organisasi yang bersifat formal dan kaku.

Kedua, partisipasi warga terhadap program coremap sangat rendah. Implikasi hubungan yang tidak terbangun dengan baik di dalam struktur organisasi coremap itu menyebabkan banyak warga yang tercantum namanya dalam kepengurusan organisasi bersikap apatis. Sikappara pengurus bawahan ini mempengaruhi pendapat warga secara umum dan membentuk opini program coremap di desa ini. Dengan terbentuknya opini yang kurang menguntungkan itu, posisi ketua LPS-TK semakin terjepit dan semakin terjebak dalam jarring-jaring organisasi formal dan kaku diatas. Singkatnya, struktur organsiasi yang ideal di bawah ini tidak seluruhnya berjalan dengan baik, hanya beberapa komponenen organisasi saja yang masih berjalan di desa ini.

Struktur Organisasi Coremap Kabupaten Tapanuli Tengah



2.2. PROGRAM BANTUAN FISIK DESA

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program bantuan fisik desa adalah bangunan infrastruktur yang berupa Pondok Informasi terletak di pinggir pantai di wilayah Dusun I. Sayangnya pondok tersebut kurang dimanfaatkan untuk kegiatan COREMAP dan belum ada tanda-tanda sebagai penyebaran informasi yang berkaitan dengan program COREMAP. Bahkan tangki air untuk keperluan pondok baru sebulan dipasang telah hilang. Kadang-kadang pondok informasi ini digunakan penduduk untuk berkumpul sebagai tempat pertemuan, karena desa belum memiliki gedung pertemuan. Misalnya ketika ada pertemuan anggota HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) dalam rangka pembentukan kelompok tersebut di Desa Jago-Jago mereka menggunakan pondok ini dengan alasan daripada tidak digunakan.

Desa Jago-jago merupakan desa miskin yang sering mendapatkan bantuan pemerintah sehingga masarakatnya terbiasa dengan bantuan-bantuan atau proyek-proyek pananganan kemiskinan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama yang berorientasi pada penanganan kemiskinan sangat rendah. Karakternya sulit dikendalikan dan cenderung mengharapkan ada uang di setiap pertemuan.

Kondisi fisik dan lingkungan desa Jago-jago sangat memprihatinkan. Sanitasi di lingkungan desa itu sangat buruk, tidak ada saluran pembuangan air, tidak ada MCK yang layak, dan air bersih sulit diperoleh. Pada musim kemarau, air bersih tidak ada sehingga warga harus mencari air bersih ke seberang laut yakni di daratan. Pada musim hujan mereka menadah air hujan dan menyerap air hujan yang jatuh di bukit lalu menyalurkannya melalui pipa-pipa kecil ke rumah-rumah serta ke tempat umum yang mudah dijangkau penduduk desa.

Program air bersih yang dilakukan oleh coremap gagal karena berupa sumur bor/pompa. Air yang keluar dari sumur bor/pompa ini berwarna kuning. Pilihan untuk membuat sumur bor/pompa ini disebabkan karena tidak ada sumber mata air di bukit yang persediaan airnya cukup untuk musim kemarau. Sumber mata air di bukit hanya tersedia pada musim

penghujan saja dan usaha untuk menyalurkan sumber air pada musim penghujan ini sudah dilakukan oleh penduduk sebelumnya.

Gagasan membuat sumur bor/pompa adalah untuk mengatasi kekurangan air bersih pada musim kemarau. Namun karena air yang keluar berwarna kuning maka program itu tidak dimanfaatkan oleh penduduk desa. Demikian pula sarana penunjang lainnya berupa bak penampungan air, kamar mandi yang berfungsi MCK dan tandon air. Ironisnya bantuan fisik berupa tandon air itu malah dicuri sehingga bantuan itu lenyap.

Kondisi tanah di desa berpasir karena desa dikitari laut/tanjung sehingga akses ke darat ditempuh dengan menggunakan perahu kecil. Bantuan infrastruktur yang berasal dari Pemda adalah pembuatan jembatan gantung (*rambin*) yang menghubungkan desa itu dengan daratan sepanjang sekitar 100 meter. Namun demikian baru tiga bulan digunakan jembatan gantung itu sudah miring sehingga agar tidak membahayakan penyeberang maka jembatan gantung itu sekarang ditutup kembali dan sedang diperbaiki.

Bronjong yang dibangun beberapa tahun sebelumnya juga sudah mulai mengalami kerusakan. Bronjong adalah kawat yang diisi batu yang berfungsi sebagai tanggul untuk menahan ombak di pantai. Dibangunnya bronjong ini menambah luas daratan desa karena sedimentasi muara sungai di desa itu yang bertemu dengan ombak pantai yang dibatasi bronjong membentuk delta sehingga daratan kampung tambah luas dan rumah-rumah penduduk bisa dibangun di atasnya.

Pemda setempat juga menguasai pantai di desa itu sebagai pantai wisata. Ada bagian pantai yang berpasir putih di ujung desa yang biasa disebut sebagai pantai wisata yang biasa dikunjungi orang luar desa setiap hari libur. Jembatan gantung itu dimaksudkan untuk mendukung pantai wisata itu. Namun karena jembatan gantung rusak maka kegiatan pantai wisata menjadi sepi.

Bantuan fisik lainnya dan relatif baru adalah pembangunan balai desa yang terletak di pinggir pantai. Balai desa tersebut selain difungsikan sebagai kantor desa juga sebagai tempat pertemuan warga desa. Keberadaan bangunan tersebut sangat membantu masyarakat Jago-jago karena dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi desa maupun tempat pertemuan kalau ada acara-acara desa.

BAB III

PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN CAPAIAN COREMAP

Nelayan di desa Jago-jago umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis saat penelitian ini dilakukan yakni nelayan pancing, nelayan bulanan, dan nelayan pulang-balik. Nelayan pancing dan nelayan pulang-balik merupakan jenis nelayan yang sudah berlangsung lama di desa ini. Jenis nelayan ini hanya mengandalkan alat tradisional yang sangat sederhana sehingga sangat dipengaruhi oleh musim di laut. Sedangkan nelayan bulanan adalah jenis pekerjaan nelayan menjadi ABK atau buruh kapal besar yang berlaut selama hampir satu bulan atau bahkan lebih dari satu bulan. Jenis kapal besar ini hanya ada di Sibolga, kota kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan pelabuhan besar di wilayah itu. Jenis nelayan bulanan atau menjadi ABK dengan demikian merupakan jenis nelayan sekunder bagi nelayan desa Jago-jago karena mereka hanya ikut kapal orang lain menjadi buruh. Dengan demikian jenis pekerjaan ini sangat tergantung dari "panggilan bos" atau ada tidaknya kesempatan pasar kerja menjadi ABK di Sibolga.

Pada saat penelitian ini dilakukan, banyak usaha jenis nelayan tradisional di desa Jago-jago yang berhenti. Hanya beberapa nelayan yang masih melakukan penangkapan dengan peralatan tradisional itu seperti nelayan pancing. Untuk jenis nelayan bagan, sudah lama bangkrut. Sampai penelitian ini dilakukan nelayan bagan hanya tinggal 2 orang, padahal pada tahun 1980-an hampir semua nelayan memiliki bagan untuk menangkap ikan teri ini. Selain modal untuk merawat bagan semakin menipis, ikan sulit didapat. Demikian pula nelayan pulang-balik, menurun drastis gairah kenelayannya. Jenis nelayan pancingpun tidak semua bisa melakukan karena ternyata memancing ikan sehari-hari di laut membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh segelintir nelayan di saat sulit ikan. Teknik ini didukung dengan

pemasangan rumpon yang juga memerlukan modal bahan. Oleh karena itu, alternatif pekerjaan sebagai ABK banyak diambil oleh nelayan desa Jago-jago saat itu.

Faktor utama kelesuan kehidupan kenelayanan di desa Jago-jago adalah karena kondisi terumbu karang di sekitar pantai di desa itu sudah semakin rusak jika dibandingkan tahun 1980-an atau sebelumnya. Pantai karang sepanjang 2 km dan karang-karang di sekitar desa itu sampai Sitardas sudah kurang menguntungkan kehidupan nelayan di desa itu. Menurut banyak nelayan yang diwawancarai, "ikan sudah sulit didapat". Sementara teknologi penangkapan ikan mereka tidak berkembang secara signifikan maka kehidupan kenelayanan di desa itu semakin sepi. Tidak setiap hari ada ikan yang bisa dikonsumsi oleh rumah-tangga nelayan. Mereka seringkali harus membeli dari nelayan pancing yang masih bisa bertahan atau membeli ikan dari luar desa di pasar. Kondisi lesu di desa Jago-jago ini pada akhirnya juga mempengaruhi pendapatan rumah-tangga nelayan khususnya yang berasal dari laut.

3.1. PERUBAHAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Gambaran singkat mengenai kehidupan kenelayanan di desa Jago-jago yang lesu diatas juga diikuti dengan kecenderungan alih profesi atau perubahan mata pencaharian masyarakat dari laut ke darat. Banyak warga desa yang sudah tidak ke laut lagi sekarang beralih menjadi buruh tani atau buruh kebun kelapa sawit milik tuan-tuan tanah atau tuan-tuan kebun di sekitar desanya. Mereka bekerja di ladang dan di kebun dengan diupah setiap harinya. Menjadi buruh upahan sebenarnya bukan pekerjaan baru bagi mereka karena keberadaan ladang dan kebun berdampingan dengan laut. Umumnya, di saat kehidupan laut menurun atau menjadi sulit maka mereka mencari alternatif pendapatan ke ladang dan kebun. Namun demikian seperti pada saat ini ketika ikan di laut sudah sangat sulit diperoleh maka ladang dan kebun berubah menjadi sumber alternatif utama mereka.

Perubahan mata pencaharian ini kurang menguntungkan penduduk desa karena hanya sebagai buruh. Hal ini tampak pada pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga. Pada tabel di bawah memperlihatkan pendapatan rumah-tangga tidak mengalami perbaikan sejak tahun 2005. Pendapatan mereka mengalami penurunan yang cukup drstis pada tahun 2007 dan hanya sedikit menggeliat pada tahun 2009 ini. Tetapi geliat pendapatan sekarang tidak lebih besar dari pendapatan mereka pada tahun 2005, sedangkan inflasi pada tahun 2009 ini cenderung tinggi jika dibandingkan pada tahun 2005. Kondisi pendapatan rumah-tangga yang menurun menandakan kehidupan rumah-tangga mereka agak merosot terutama karena pendapatan dari laut sudah tidak bisa diandalkan lagi.

Tabel 3.1. Statistik Pendapatan Penduduk Per Bulan dan Perubahannya 2005-2009 dan 2007-2009

No	Pendapatan	Nilai (Rp)			Perubahan (%)	
		2005	2007	2009	2005-2009	2007-2009
1	Pendapatan per kapita/ bulan	238.617	195.907	231.333	-3,05	18,08
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/ bulan	1.167.860	951.020	923.605	-20,91	-2,88
3	Pendapatan rumah tangga minimum/ bulan	116.667	75.000	90.000	-22,85	20
4	Pendapatan rumah tangga maksimum/ bulan	9.160.000	6.000.000	4.120.000	-55,02	-31,33

Sumber : Data primer, Survai Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2005, 2007, 2009.

Pada tabel itu bisa dideskripsikan secara lebih detail untuk mengetahui perubahan-perubahan pendapatan yang rinci. Pendapatan per kapita per bulan mengalami penurunan sebesar -3,05% antara tahun 2005-2009, walaupun ada kenaikan sebesar 18,08% antara tahun 2007-2009 namun kenaikan itu tidak lebih besar dari pendapatan per kapita yang dicapai

pada tahun 2005. Apabila diperhatikan, pendapatan per kapita pada tahun 2005 mencapai Rp238.617,- sedangkan pendapatan per kapita tahun 2009 turun menjadi Rp231.333,-. Sedangkan harga-harga barang sekarang jika dibandingkan dengan harga-harga barang tahun 2005 lebih tinggi. Dengan demikian tingkat inflasi yang dialami sekarang semakin tinggi pula.

Pada rata-rata pendapatan rumah-tangga per bulan tampak ada penurunan yang menyolok yakni sebesar -20,91% antara tahun 2005-2009, dengan penurunan antara tahun 2007-2009 sebesar -2,88%. Penurunan rata-rata pendapatan terutama dikontribusi oleh rumah-tangga miskin yang selama ini mengandalkan kehidupannya pada sumber daya laut. Menurunnya hasil tangkapan laut dan terbatasnya alternatif mata pencaharian di darat seperti di ladang dan kebun kelapa sawit membuat rumah-tangga miskin merosot perekonomiannya. Tampak pada tabel diatas bahwa rata-rata pendapatan rumah-tangga mengalami penurunan terus-menerus dari tahun 2005, 2007 dan 2009 yakni masing-masing sebesar Rp1.167.860,- menjadi Rp951.020,- dan turun lagi menjadi Rp923.605,-.

Selanjutnya berdasarkan jenjang pendapatannya yakni pendapatan minimum dan maksimum tampak terlihat kesenjangan pendapatan yang sangat menyolok selama tahun 2005, 2007 dan 2009. Pada tahun 2005 pendapatan minimum rumah-tangga sebesar Rp116.667,- tetapi pendapatan maksimum rumah-tangga mencapai Rp9.160.000,-. Kesenjangan pendapatan yang sangat menyolok ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2007 dan 2009. Pada tahun 2007 pendapatan minimum rumah-tangga sebesar Rp75.000,- sedangkan pendapatan maksimum mencapai Rp6.000.000,-. Sementara itu pada tahun 2009 pendapatan minimum rumah tangga sebesar Rp90.000 dan pendapatan maksimum mencapai Rp4.120.000,-. Walaupun terdapat penurunan pendapatan maksimum rumah-tangga yang cukup besar yakni -55,02% antara tahun 2005-2009 namun pendapatan minimum rumah-tangga juga mengalami penurunan yang cukup besar yakni mencapai Rp-22,85% antara tahun 2005-2009.

Sedangkan pada tabel dibawah terlihat struktur pendapatan rumah-tangga berdasarkan kelompok pendapatan yang dibuat, sebagai berikut:

Tabel. 3.2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Kelompok Pendapatan, Desa Jago-Jago, Tahun 2005

No	Kelompok Pendapatan (Rp)	2005	2007	2009
1	< 500.000	16,0	30,0	30,0
2	500.000 – 999.999	46,0	45,0	43,0
3	1.000.000 – 1.499.999	21,0	11,0	15,0
4	1.500.000 – 1.999.999	7,0	7,0	6,0
5	2.000.000 – 2.499.999	3,0	0	3,0
6	> 2.500.000	7,0	7,0	3,0
	Jumlah	100	100	100

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2005, 2007, 2009

Tampak pada table bahwa kelompok pendapatan paling kecil yakni kurang dari Rp500.000,- per bulan mengalami lonjakan yang sangat besar mendekati 100% yakni dari 16% pada tahun 2005 menjadi 30% pada tahun 2007 dan 2009. Tabel ini menjelaskan bahwa terdapat penurunan kelompok pendapatan rumah-tangga di atasnya yang masuk ke dalam kelompok pendapatan paling kecil ini. Pada table terlihat bahwa penurunan kelompok pendapatan di atasnya yang menurun cukup drastic adalah kelompok pendapatan antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp1.499.999,- yakni menurun dari 21% pada tahun 2005 menjadi 11% pada tahun 2007 dan 15% pada tahun 2009. Kelompok pendapatan lain yang mengalami penurunan adalah kelompok pendapatan di atas Rp2.500.000,- yang turun dari 7% pada tahun 2005 dan 2007 menjadi 3% pada tahun 2009.

Pergeseran kelompok pendapatan rumah-tangga ini secara umum tidak mengubah struktur pendapatan masyarakat yang timpang berbentuk seperti piramida dimana kelompok pendapatan besar berada di atas atau

sedikit jumlah rumah-tangganya sedangkan kelompok pendapatan kecil berada di bawah atau besar jumlah rumah-tangganya. Perubahan kelompok pendapatan dari tahun 2005 sampai tahun 2009 justru semakin mempertajam ketimpangan pendapatan masyarakat desa Jago-jago karena struktur piramidanya semakin runcing dengan semakin banyaknya rumah-tangga yang berpendapatan rendah.

3.2. PERUBAHAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN

Sebagaimana dijelaskan dimuka, perubahan mata pencaharian yang paling menyolok di kalangan masyarakat desa Jago-jago terjadi di kalangan rumah-tangga nelayan kecil. Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil survei rumah-tangga nelayan di Desa Jago-jago yang umumnya merupakan nelayan kecil. Pada tabel terlihat perubahan pendapatan rumah-tangga nelayan kecil dari tahun 2005-2009 dan 2007-2009 mengalami penurunan drastis. Data ini semakin menjelaskan bahwa rumah-tangga nelayan kecil di desa Jago-jago sedang dilanda krisis yang hebat pada saat penelitian ini dilakukan.

Tabel. 3.3. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Khusus Nelayan Per Bulan dan Perubahannya 2005-2009 dan 2007-2009

No	Pendapatan	Nilai (Rp)			Perubahan (%)	
		2005	2007	2009	2005-2009	2007-2009
1	Pendapatan per kapita/ bulan	217.096	241.599	104.255	-51,9	-56,8
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/ bulan	1.196.857	1.092.144	547.753	-54,2	-49,8
3	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	176.666	139.333	66.666	-62,3	-52,2
4	Pendapatan rumah tangga maksimum/ bulan	9.160.000	6.000.000	5.400.000	-41,0	-10

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2005, 2007, 2009.

Rata-rata pendapatan rumah-tangga nelayan per bulan terus-menerus mengalami penurunan sejak tahun 2005, 2007 dan anjlok pada tahun 2009. Penurunan pada tahun-tahun itu adalah dari 1.196.857 (2005) menjadi 1.092.144 (2007) dan anjlok menjadi 547.753 (2009). Selama empat tahun (2005-2009) rata-rata pendapatan rumah-tangga nelayan mengalami penurunan sebesar -54,2%, sedangkan antara tahun 2007-2009 turun -49,8%. Memperhatikan harga-harga barang kebutuhan pokok tidak mengalami penurunan sebaliknya cenderung menaik maka sudah bisa dipastikan bahwa anjloknya rata-rata pendapatan rumah-tangga nelayan itu semakin diperparah oleh situasi inflasi di daerah. Dengan rata-rata pendapatan pada tahun 2009 itu dapat diperkirakan bahwa umumnya perekonomian rumah-tangga nelayan sedang jatuh pada keadaan yang paling buruk.

Hal ini diperkuat dengan merosotnya pendapatan per kapita rumah-tangga nelayan yakni dari 217.096 (2005) menjadi 241.599 (2007) dan merosot menjadi 104.255 (2009). Antara tahun 2005-2009 pendapatan per kapita rumah tangga nelayan mengalami penurunan sebesar -51,9% dan antara tahun 2007-2009 mengalami penurunan sebesar -56,8%. Penurunan yang tajam pada pendapatan per kapita ini seiring dengan penurunan pendapatan rumah-tangga nelayan per bulan.

Apabila memperhatikan rentang pendapatan minimum dan maksimumnya maka terlihat adanya kesenjangan yang sangat tajam pada kalangan rumah-tangga nelayan di desa Jago-jago. Pendapatan minimum pada tahun 2005 adalah sebesar 176.666, sedangkan pendapatan maksimum mendapai 9.160.000. Kesejangan antara pendapatan minimum dan maksimum ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun antara tahun 2005-2009 dan 2007-2009. Pada pendapatan minimum antara tahun 2005-2009 mengalami penurunan sebesar -62,3, sedangkan pada pendapatan maksimumnya menurun -41,0. Demikian pula antara tahun 2007-2009, pendapatan minimumnya mengalami penurunan -52,2, sedangkan pendapatan maksimumnya mengalami penurunan -10.

Pada tabel di bawah terlihat terjadi perubahan distribusi pendapatan yang sangat besar antara tahun 2005, 2007 dan 2009. Pada tahun 2005, distribusi pendapatan rumah-tangga nelayan masih cukup beragam dengan kecenderungan yang timpang seperti adanya kelompok pendapatan di bawah Rp500.000,- sebesar 11,4% tetapi ada juga kelompok pendapatan antara Rp500.000,- sampai dengan Rp999.000,- yang lebih besar yakni mencapai 40,9%.

Tabel. 3.4. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Khusus Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan, Desa Jago-jago, Tahun 2005 dan 2007

Kelompok Pendapatan	Persentase		
	2005	2007	2009
< 500.000	11,4	46,3	60,4
500.000 - 999.000	40,9	26,8	35,4
1.000.000 - 1.499.999	22,7	9,8	-
1.500.000 - 1.999.999	11,4	2,4	2,1
2.000.000 - 2.499.999	2,3	2,4	-
>2.500.000	11,4	12,2	2,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2005, 2007, 2009

Demikian pula pada tahun 2007 terdapat beragam kelompok pendapatan walaupun telah terjadi pergeseran. Pada tahun 2007 mulai tampak adanya pergeseran kelompok pendapatan rumah-tangga nelayan ke bawah yakni kelompok pendapatan kurang dari Rp500.000,- per bulan mulai menggembung yakni mencapai 46,3% atau hampir mendekati 50% jumlah rumah-tangga nelayan yang ada di desa itu. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007, banyak rumah-tangga nelayan yang sudah mulai kurang mendapat keuntungan dari sektor kelautan. Penuturan nelayan, "ikan sudah sulit didapat", sudah mulai

dirasakan sejak tahun 2007 sehingga banyak kelompok pendapatan rumah-tangga yang sebelumnya berada diatas turun ke bawah sehingga struktur pendapatan rumah-tangga nelayan pada tahun 2007 itu semakin menggembung di bawah.

Tetapi yang semakin mengejutkan adalah dua tahun sesudahnya yakni survey tahun 2009. Pada survey tahun 2009 ini kondisi pendapatan rumah-tangga nelayan bukan bertambah baik namun sebaliknya semakin bertambah buruk. Pada table diatas terlihat bagaimana struktur pendapatan rumah-tangga itu semakin bertambah menggembung ke bawah dengan besar kelompok pendapatan rumah-tangga kurang dari Rp500.000,- semakin bertambah besar yakni dari 46,3% pada tahun 2007 menjadi 60,4% pada tahun 2009 atau jauh lebih besar dari separoh rumah-tangga nelayan yang di survey. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separoh rumah-tangga nelayan di desa itu telah anjlok pendapatan rumah-tangganya ke level yang paling rendah. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa perekonomian rumah-tangga masyarakat nelayan di desa itu mengalami krisis yang cukup hebat sehingga struktur yang sebelumnya lebih beragam kini sangat besar berada pada lapisan paling bawah.

Kondisi ini diperkuat dengan data yang tertuang pada table di bawah ini. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada hampir semua kondisi musim baik musim ombak lemah, musim pancaroba dan musim ombak kuat pendapatan rumah-tangga nelayan di desa Jago-jago cenderung mengalami penurunan dari tahun 2005, 2007 dan 2009. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa sumber daya laut tidak bisa lagi menjadi tumpuan utama mereka sementara itu alternatif sumber-sumber pendapatan rumah-tangga belum ada yang menggantikannya. Situasi ini menimbulkan krisis ekonomi yang hebat di kalangan rumah-tangga nelayan di desa Jago-jago sekarang ini.

Tabel 3.5. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim

Pendapatan	Musim								
	Ombak Lemah			Pancaroba			Ombak Kuat		
	2005	2007	2009	2005	2007	2009	2005	2007	2009
Rata-rata rumah tangga	2.244.000	1.466.341	815.919	1.188.802	989.652	568.138	845.418	793.609	499.260
Minimum	340.000	150.000	200.000	325.000	120.000	40.000	150.000	38.000	66.000
Maksimum	16.605.000	9.000.000	6.375.000	9.375.000	5.000.000	750.000	4.500.000	6.000.000	320.000

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LPI, 2005, 2007, 2009

Rata-rata pendapatan rumah-tangga pada musim ombak kuat pada tahun 2005, 2007 dan 2009 mengalami penurunan masing-masing adalah Rp845.418,- menjadi Rp793.609,- dan menjadi Rp499.260,-. Demikian pula pada musim pancaroba yakni dari Rp1.188.802,- menjadi Rp989.652,- dan menjadi Rp568.138,-. Pada musim ombak lemah yang seharusnya nelayan mempunyai peluang yang lebih baik untuk menangkap ikanpun mengalami penurunan yang sangat drastis. Berturut-turut penurunan rata-rata pendapatan rumah-tangga nelayan itu adalah Rp2.244.000,- menjadi Rp1.466.341,- dan menjadi Rp815.919,-. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penurunan rata-rata pendapatan rumah-tangga nelayan terjadi pada semua musim dan terjadi penurunan terus-menerus selama empat tahun terakhir dari tahun 2005, 2007 dan 2009.

Pada tabel di atas juga terlihat pendapatan minimum dan pendapatan maksimum masyarakat nelayan desa Jago-jago dari tahun 2005, 2007 dan 2009 pada berbagai musim. Pada musim ombak lemah pendapatan minimum masyarakat mengalami penurunan dari tahun 2005, 2007 dan 2009 yakni Rp340.000,- menjadi Rp150.000,- dan menjadi Rp200.000,-. Sedangkan pendapatannya juga mengalami penurunan dari Rp16.605.000,- menjadi Rp9.000.000,- dan menjadi Rp6.375.000,-.

Pada musim pancaroba, pendapatan minimum juga mengalami penurunan dari tahun 2005, 2007 dan 2009 yakni berturut-turut sebesar Rp325.000,- menjadi Rp120.000,- dan menjadi Rp40.000,-. Sedangkan pendapatannya juga mengalami penurunan yakni berturut-turut dari Rp9.375.000,- menjadi Rp5.000.000,- dan menjadi Rp750.000,-. Demikian pula pada ombak kuat berturut-turut pendapatan minimumnya dari Rp150.000,- menjadi Rp38.000,- dan menjadi Rp66.000,-. Sedangkan pendapatannya berturut-turut dari Rp4.500.000,- menjadi Rp6.000.000,- dan menjadi Rp320.000,-.

Penurunan pendapatan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2007 dan tahun 2009 khususnya pada musim pancaroba dan musim ombak kuat. Pada tahun 2007 pada musim pancaroba, pendapatan minimum hanya sebesar Rp40.000,- sedangkan pendapatannya maksimum hanya

Rp750.000,-. Sedangkan pada tahun 2009, pendapatan minimum hanya Rp66.000,- sedangkan pendapatan maksimum hanya Rp320.000,-. Penurunan pendapatan ini sangat menyolok, bukan hanya memperlihatkan tingkat kesenjangan pendapatan yang bergeser semakin rendah tetapi juga memperkuat penjelasan di atas bahwa pada tahun 2009 ekonomi rumah-tangga nelayan di desa Jago-jago mengalami krisis yang hebat.

Pada table di bawah diperlihatkan bahwa pada semua musim baik musim ombak lemah, musim pancaroba dan musim ombak kuat terjadi pergeseran kelompok pendapatan dengan kecenderungan pergeseran ke bawah atau menggembung ke kelompok pendapatan paling rendah. Perbedaan musim, tampaknya tidak terlalu mempengaruhi kecenderungan pergeseran pendapatan yang turun ke kelompok paling bawah ini. Kecendrungan itu bertambah turun pada tahun 2009 terutama pada musim pancaroba dan musim sulit ikan dimana kelompok pendapatan paling bawah adalah mayoritas pendapatan rumah-tangga nelayan.

Pada musim banyak ikan, ekonomi nelayan tampaknya masih sedikit tertolong. Pada table terlihat kelompok pendapatan menengah yakni antara Rp500.000,- sampai dengan Rp999.999,- yang cukup mendominasi sebaran kelompok pendapatan yang ada. Walaupun kelompok pendapatan ini tergolong mendekati kelompok paling bawah namun gambaran pada musim banyak ikan ini sedikit menolong krisis ekonomi yang melanda rumah-tangga nelayan desa Jago-jago selama kurun waktu empat tahun terakhir yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

Tabel 3.6. Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan dan Musim, Desa Jago-Jago, Tahun 2005

No	Kelompok Pendapatan (Rp)	Banyak Ikan			Pancaroba (Kurang Ikan)			Sulit Ikan		
		2005	2007	2009	2005	2007	2009	2005	2007	2009
1	< 500.000	14,0	34,1	32,7	14,0	48,8	63,8	37,2	51,2	62,5
2	500.000 – 999.999	25,6	36,6	46,9	48,8	29,3	29,8	41,9	26,8	29,2
3	1.000.000 – 1.499.999	20,9	4,9	12,2	20,9	7,3	4,3	11,6	9,8	97,9
4	1.500.000 – 1.999.999	14,0	7,3	4,1	9,3	0	-	4,7	4,9	-
5	2.000.000 – 2.499.999	7,0	2,4	-	2,3	2,4	-	0,0	0	-
6	> 2.500.000	18,6	14,6	4,0	4,7	12,2	2,1	4,7	7,2	2,1
	Jumlah (N)	100,0 (43)	100,0 (41)	100,0 (49)	100,0 (43)	100,0 (41)	100,0 (47)	100,0 (43)	100,0 (41)	100,0 (48)

Sumber : Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2005, 2007, 2009

Kecendrungan yang agak berbeda terjadi pada rumah-tangga yang mendapatkan bantuan berupa dana bergulir yang memiliki pedapatan rumah-tangga dan pendapatan per kapitan lebih besar daripada yang tidak menerima bantuan dana bergulir. Rumah-tangga yang menerima bantuan dana bergulir memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan sekitar Rp879.351, dengan pendapatan per kapita sekitar Rp308.271,-. Perubahan pendapatan pada kelompok rumah-tangga yang menerima bantuan berupa dana bergulir ini tidak bisa dilihat secara urutan waktu sebagaimana analisa perubahan pendapatan diatas karena tidak tersedia data rumah-tangga yang menerima dana bergulir pada tahun sebelumnya yakni tahun 2005 dan 2007. Salah satu kemungkinan lebih besarnya rata-rata pendapatan rumah-tangga yang menerima bantuan dana bergulir ini karena mereka memasukkan dana bantuan itu sebagai salah satu komponen pendapatan rumah-tangga yang berpengaruh.

3.3. FAKTOR YANG BERPENGARUH

3.3.1. Program Coremap

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, program coremap yang dijalankan di desa jago-jago mengalami banyak permasalahan dan kendala. Banyaknya masalah dan kendala ini menyebabkan program coremap tidak banyak yang bisa berjalan secara berkelanjutan. Pada umumnya, program coremap di desa Jago-jago berjalan pada tahap uji coba saja, namun setelah itu ketika kelompok masyarakat diminta untuk melanjutkan program yang sudah diberi modal awal itu tidak bisa berjalan dengan baik bahkan mati.

Dari 16 program coremap yang pernah direncanakan di desa Jago-jago, pernah dijalankan melalui tahap uji coba sebanyak 10 program. Namun dari 10 program yang dijalankan secara uji coba itu, hanya tersisa 3 program yang selama tahun 2009 masih dalam tahap uji coba juga. Ketiga program itu adalah budidaya ikan lele, usaha ekonomi produktif

berupa usaha dodol rumput laut dan kerupuk ikan oleh kelompok ekonomi perempuan, dan usaha kedai pesisir.

Khususnya untuk usaha dodol rumput laut dan kerupuk ikan baru diujicoba saat penelitian dilakukan. Kendalanya adalah pengemasan produk dan pemasaran yang belum terbentuk sehingga belum memberikan hasil kepada rumah-tangga. Selain itu dari tiga kelompok yang melakukan uji coba, hanya 3-4 orang yang terlibat dalam setiap kelompok sehingga kalau ada keuntungan tidak berdampak besar terhadap kondisi perekonomian rumah-tangga nelayan yang sedang mengalami krisis ini.

Demikian pula dengan budidaya ikan lele, belum ada yang menuai panen ikan lele secara menguntungkan. Banyak yang mati di tengah jalan dan walaupun sudah ada yang panen, tidak memberikan keuntungan yang besar. Itupun baru terjadi sekali dua kali sehingga dampaknya terhadap perekonomian rumah-tangga nelayan belum bisa dirasakan. Selain itu, masih muncul adanya kecemburuan dalam kelompok adalah adanya kecemburuan antara mereka yang sudah mendapatkan bantuan dan dan yang belum mendapatkan. Pembibitan lele belum sepenuhnya seperti yang dijanjikan. Akibatnya, perkembangan sangat lambat. Sistem anggaran yang ada dianggap menghambat jalannya kegiatan. Anggaran yang turun pertahun dianggap kurang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan yang multi years. Pendampingan dilakukan oleh LSM yang direkrut oleh DKP setempat dengan menggunakan sistem kontrak per tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan cukup terganggu karena seringkali dana turun terlambat. Misalnya tahun 2009 sampai bulan Mei dana belum turun padahal pendampingan harus jalan terus.

Bahkan banyaknya masalah dan kendala budidaya ikan lele membuat sebagian besar anggota yang melakukan uji coba ini berhenti di tengah jalan atau tidak melanjutkan usahanya.

Sedangkan kedai pesisir, sebagaimana dijelaskan dimuka hanya dikelola oleh satu orang yang diupah. Keuntungan kedai pesisir yang sekitar

Rp600.000,- per bulan tidak diketahui oleh anggotanya atau hanya diketahui oleh ketua LPS-TK dan tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jikapun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya belum terasa karena keuntungannya masih kecil. Kecenderungan kedai pesisir sendiri yang hanya menjadi grosir terhalang oleh agen grosir yang mengantarkan barangnya ke warung-warung tradisional yang terdapat di desa Jago-jago yang sistem pembayarannya bisa dicicil sehingga kedai pesisir kurang laku.

Dari ketiga program coremap yang masih berjalan itu tidak satupun mampu mengatasi persoalan besar krisis ekonomi rumah-tangga nelayan yang disebabkan oleh sulitnya tangkapan ikan. Kecenderungan menjadi ABK di kapal-kapal besar di Sibolga mungkin akan sedikit menolong ekonomi rumah-tangga mereka namun sesungguhnya memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada toke-toke atau juragan. Dengan demikian hubungan kerja di kalangan masyarakat desa itu semakin tergantung pada toke-toke dan jauh dari usaha ekonomi yang mandiri.

3.3.2. Non Coremap

Selain program coremap, sebenarnya ada program lain seperti pembangunan infrastruktur jembatan gantung namun itupun rusak dalam kurun waktu tiga bulan. Jembatan gantung ini awalnya dimaksudkan untuk menarik wisatawan lokal ke pantai pasir putih di desa itu tetapi itupun hanya berjumlah kecil. Sedangkan program lain yang cukup berdampak sebenarnya adalah program anti kemiskinan yang dijajana oleh pemerintah pusat secara nasional termasuk di desa Jago-jago yakni berupa program PNPM Mandiri. Program anti kemiskinan ini sebagian dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa namun sebagian besar yang lain juga disalurkan sebagai modal awal usaha ekonomi produktif tingkat rumah-tangga.

Namun demikian, program anti kemiskinan yang dijalankan di kalangan masyarakat nelayan desa Jago-jago yang sedang mengalami krisis ini

juga kurang berdampak secara luas terhadap peningkatan ekonomi rumah-tangga. Hal ini tampak dari minimnya usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat yang dijalankan di desa itu kecuali hanya warung kelontong yang dikelola secara tradisinal dan usaha daun nipah untuk kertas rokok. Kedua usaha ini sesungguhnya telah berlangsung lama di desa ini bahkan usaha daun nipah telah berlangsung sejak tahun 1960-an. Dengan demikian tidak terlihat usaha ekonomi produktif yang menyolok yang berhasil didanai melalui PNPM Mandiri ini.

Menurut penuturan salah seorang pengurusnya, modal awal yang disalurkan melalui PNPM Mandiri untuk usaha ekonomi produktif tingkat rumah-tangga banyak yang disalahgunakan bukan untuk modal usaha namun untuk membayar pinjaman atau membayar kebutuhan rumah tangga yang mendesak seperti berobat dan sekolah. Kondisi ini menyebabkan program anti kemiskinan itu hanya akan menjadi tambal sulam krisis ekonomi yang menimpa rumah-tangga nelayan. Artinya, program yang didesign untuk meningkatkan perekonomian rumah-tangga secara berkelanjutan ini tidak mejadi kenyataan di kalangan rumah-tangga yang paling miskin yang sudah tertimpa krisis dan terbebani banyak pinjaman.

Faktor lain yang berkaitan dengan program-program pembangunan adalah karena seringnya masyarakat desa Jago-jago dijadikan obyek proyek bantuan sehingga partisipasi mereka untuk melakukan usaha bersama keluar dari krisis ekonomi itu sangat sulit dilakukan. Selama ini, masyarakat desa Jago-jago diidentikkan dengan masyarakat desa miskin sehingga menjadi ajang bantuan berbagai program pemerintah dari berbagai dinas atau instansi pemerintah. Dengan semakin banyaknya program bantuan sementara program-program bantuan yang sudah pernah dijalankan di desa Jago-jago itu tidak direncanakan bersama masyarakat maka pada akhirnya program-program itu hanya bersifat karitatif. Masyarakat desa itu bahkan sudah bisa menduga bahwa setiap program bantuan tidak akan bermanfaat banyak untuk menolong kondisi perekonomian rumah-tangga mereka. Sikap skeptis seperti ini

tumbuh akibat banyaknya program bantuan yang diberikan di desa itu dengan memandang masyarakat desa sebagai obyek pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berbagai bantuan pemerintah melalui instansi terkait belum mampu mengeluarkan rumah-tangga desa Jago-jago dari kondisi kemiskinan. Walaupun demikian faktor utama kemiskinan itu sendiri bukan terletak pada program-program bantaun itu namun karena merosotnya hasil tangkapan ikan nelayan di desa Jago-jago secara drastis yang menjadi faktor utama menurunnya pendapatan rumah-tangga mereka. Menurunnya hasil tangkapan ikan dalam kurun antara tahun 2005 sampai dengan 2009 sendiri dikatakan karena kondisi terumbu karang di wilayah tangkap mereka sudah rusak sehingga ikan berkurang drastis dan semakin sulit ditangkap. Sementara itu, alat tangkap mereka tidak mengalami perkembangan yang berarti sehingga mereka tidak bisa menjangkau wilayah tangkap lain diluar wilayah tangkapnya selama ini yang kondisi terumbu karangnya sudah rusak. Oleh karenanya banyak nelayan desa Jago-jago yang beralih dari nelayan menjadi ABK atau buruh kapal di Sibolga yang mempunyai armada kapal besar yang mampu menjangkau wilayah tangkap diluar wilayah pesisir. Kapal-kapal besar ini mampu beroperasi satu bulan di laut sehingga memiliki kemampuan jarak tempuh diluar kemampuan nelayan tradisional seperti nelayan desa Jago-jago.

3.4. CAPAIAN EKONOMI COREMAP

COREMAP melalui program MPA telah memberikan peluang bagi penduduk di lokasi program untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seberapa besar capaian ekonomi COREMAP yang telah didapatkan setelah adanya kegiatan MPA tentunya dapat dihitung dengan melihat trend perubahan pendapatan rumah tangga mulai pada saat diadakan survey data dasar aspek social ekonomi COREMAP pada tahun 2005 kemudian pada saat survey BME T1 (Benefit Monitoring dan Evaluasi pada Tahun I) 2007, dan terkini BME T2 tahun 2009. Penghitungan ini perlu untuk dilakukan guna

mengetahui ada tidaknya keberhasilan COREMAP. Menurut Project Documen Appraisal (PAD) indikator keberhasilan COREMAP dari aspek social ekonomi diukur antara lain adanya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat pesisir sebanyak 5 persen setiap tahunnya) (ADB, PCR: INO 29313vCoral Rehabilitation and Management Project (Loan 1613-INO) in Indonesia

Data yang ada menunjukkan bahwa ada kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga Desa Jago-jago pada tahun 2009 dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangga pada tahun 2007 (dari Rp. 901.917 menjadi Rp. 923.065, naik sekitar 19,2 persen). Namun demikian, rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga pada tahun 2005. Dengan demikian jika dihitung tren perubahan pendapatan dalam kurun waktu 2005-2007 dan 2009 terjadi penurunan pendapatan rata-rata rumah tangga di Desa Jago-jago sebanyak -5,80 persen per tahun. Besarnya penurunan persentase pendapatan rata-rata rumah tangga tersebut dikarenakan adanya penurunan rata-rata pendapatan per kapita sebesar 0,84 persen per tahun (lihat Tabel 3) berikut. Tabel berikut menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada tahun 2009 naik secara signifikan dibandingkan dengan pendapatan dua tahun sebelumnya (2007), namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi ketika kegiatan COREMAP baru diperkenalkan (2005).

Tabel 3.7. Tren Perubahan Pendapatan Tahun 2005, 2007, 2009

Pendapatan	2005	2007	2009
Per Kapita	239.310	186.872	231.333
Kenaikan/pertumbuhan	-0,84 % per tahun		
Rata-rata Rumah tangga	1.172.406	901.917	923.065
Kenaikan/pertumbuhan	- 5,80 % per tahun		

Sumber : Survei Rumah Tangga Desa Jago-jago, 2009

Kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga Desa Jago-jago dari tahun 2007 antara lain dikarenakan oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha tanaman keras yang berupa karet. Usaha menyadap tanaman karet memberikan hasil yang cukup memadai, sekitar Rp. 700.000 setiap bulan. Usaha di bidang pertanian tanaman keras ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani, namun juga dilakukan oleh para nelayan. Meskipun para nelayan tersebut sebagian tidak mempunyai lahan pertanian namun mereka bekerja menyadap karet dengan mendapatkan upah. Di samping usaha di pertanian tanaman keras, usaha pertanian tanaman pangan seperti sayur-sayuran sudah mulai memberikan hasil. Jika pada 2007 sebagian besar penduduk masih dalam usaha membuka lahan pertanian untuk tanaman pangan tersebut, pada 2009 hasil pertanian sudah dapat dinikmati dan memberikan banyak keuntungan. Jenis sayur-sayuran yang mereka tanam cukup tinggi harganya misalnya cabai, kacang panjang, mentimun, dan terong yang dapat memberikan hasil yang memadai bagi pendapatan rumah tangga. Selain sumber pendapatan dari pertanian, industri pengolahan daun nipah masih tetap berlangsung dan memberikan tambahan bagi pendapatan rumah tangga penduduk yang mayoritas nelayan. Pekerjaan pengolahan nipah ini cenderung dilakukan oleh perempuan. Meskipun penghasilan yang diperoleh dari pengolahan daun nipah ini masih sekitar Rp. 600.000 per bulan, hal ini dirasakan sangat menolong oleh sebagian besar rumah tangga di Desa Jago-jago. Meningkatnya pendapatan rumah tangga di Desa Jago-jago dalam dua tahun terakhir juga disebabkan karena masih adanya kesempatan kerja di tambak udang maupun penyedia jasa seperti becak motor maupun jasa penyeberangan (sampan). Kenaikan pendapatan rata-rata rumah Desa Jago-jago juga disebabkan oleh adanya usaha yang dikembangkan oleh sebagian penduduk dengan dana dari beberapa sumber seperti COREMAP, GAPOKTAN maupun PNPM Mandiri. Bantuan dana yang diberikan oleh COREMAP yang dirasakan bermanfaat dalam menambah pendapatan rumah tangga adalah adanya usaha budidaya lele maupun industri rumah tangga seperti pembuatan dodol rumput laut dan kerupuk ikan.

Perubahan pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan di Desa Jago-jago menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam. Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan menurun sekitar 15,28 persen setiap tahunnya. Pendapatan rata-rata rumah tangga tahun 2009 bahkan hampir separo dari pendapatan rata-rata rumah tangga pada tahun 2007. Kondisi ekonomi rumah tangga ini lebih buruk dibandingkan dengan kondisi tahun 2005, di mana terjadi penurunan cukup drastis.

Tabel 3.8. Tren Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Desa Jago-jago, 2005, 2007, 2009.

Pendapatan	2005	2007	2009
Per Kapita	217.096,76	232.592,63	118.083
Kenaikan/pertumbuhan	- 14, 12 % per tahun		
Rata-rata Rumah tangga	1.196.857,84	1.083.201,20	616.660
Kenaikan/pertumbuhan	- 15,28 % per tahun		

Sumber : Survei Rumah Tangga Desa Jago-jago, 2009

Tren perubahan pendapatan rumah tangga nelayan Desa Jago-jago tentunya tidak lepas dari kondisi pendapatan rata-rata per kapitanya. Pendapatan rata-rata per kapita nelayan Desa Jago-jago sebetulnya pada tahun 2007 sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2005, namun sayang pendapatan rata-rata per kapita tersebut merosot tajam pada tahun 2009 (lihat Tabel 3.8 di atas).

Pendapatan rumah tangga nelayan pada tahun 2009 jauh menurun dibandingkan pada kondisi tahun-tahun sebelumnya (2005 dan 2007). Pada 2007, pendapatan perkapita nelayan sekitar 232.500, lebih tinggi dari rata-rata pendapata perkapita secara keseluruhan (Rp. 186.800). Sedangkan rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan per bulan pada tahun yang sama mencapai Rp. 1.083.200. Pada 2009, pendapatan perkapita nelayan menurun, hanya Rp.118.083 sehingga pendapatan rata-rata rumah tangga juga kecil hanya Rp 616.660. Jika rata-rata

pendapatan rumah tangga nelayan terlihat sekitar Rp. 616.000, pada kenyatannya kemungkinan jauh dari jumlah tersebut karena pengaruh dari nilai tertinggi. Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara pendapatan nelayan tertinggi dan pendapatan terendah. Pendapatan nelayan yang tertinggi mencapai Rp. 3.575.000 per bulan, sedangkan pendapatan nelayan terendah hanya Rp. 75.000 per bulan. Sementara jika pendapatan nelayan dilihat berdasarkan nilai mediannya, maka pendapatan rumah nelayan adalah Rp. 469.167. Jumlah ini kemungkinan besar mendekati kenyataan di lapangan, karena penghitungan nilai ini tidak terpengaruh oleh nilai terekstrim dari kasus yang ada. Dengan demikian dapat diungkapkan kemungkinan besar pendapatan nelayan berkisar antara jumlah tersebut.

Pada umumnya kelompok yang masuk berpendapatan tertinggi adalah nelayan pemilik bagan pancang dan atau nelayan tangkap dengan target tangkapan ikan atau teripang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, sedangkan pendapatan terendah adalah nelayan miskin, biasanya nelayan pekerja/anak buah kapal/ABK atau nelayan perorangan dengan alat tangkap yang sangat sederhana.. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2007, rata-rata pendapatan rumah tangga jauh menurun, hingga sekitar separuhnya dari sekitar Rp. 1.083.000 menjadi hanya Rp. 616.660. Salah satu kemungkinan terjadinya penurunan tersebut adalah karena menurunnya hasil tangkapan. Jika pada tahun 2007, jumlah pendapatan rumah tangga nelayan yang tertinggi Rp. 6.000.000, tahun 2009 jumlah pendapatan tertinggi hanya mencapai Rp. 3.575.000. Informasi di lapangan menunjukkan bahwa jumlah bagan pancang menurun kemungkinan besar mempengaruhi hasil pendapatan tertinggi nelayan. Sementara jumlah pendapatan rumah tangga nelayan terendah pada tahun 2009 adalah Rp. 75.000, padahal dua tahun sebelumnya sekitar Rp. 139.000. Menurut informasi dari beberapa nelayan, penurunan hasil tangkapan dikarenakan meningkatnya jumlah nelayan (termasuk yang dari luar daerah) yang mencari ikan di Teluk Sibolga dan penggunaan alat tangkap yang lebih canggih. Selain itu, menurunnya jumlah pendapatan nelayan karena sebagian nelayan mulai berfokus pada usaha ke pertanian tanaman keras (karet) dan tanaman pangan

(sayur-sayuran) yang dianggap memberikan hasil yang lebih memadai. Sebagian nelayan mulai mengurangi frekuensi melaut maupun wilayah tangkap. Hal ini didorong oleh semakin menipisnya perolehan hasil tangkap. Program mata pencaharian alternatif dari COREMAP meskipun sudah dilakukan seperti budidaya lele dan industri rumah tangga yang berupa pembuatan dodol rumput laut dan kerupuk nampaknya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga nelayan di Desa Jago-jago, karena pada saat penelitian ini berlangsung beberapa nelayan yang mengusahakan budidaya lele belum menjual hasil budidayanya. Demikian halnya dengan kegiatan pengolahan hasil rumput laut dan kerupuk udang dan ikan masih sangat terbatas pemasarannya.

Tren perubahan pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan jika dilihat menurut musim juga menunjukkan penurunan (lihat Tabel 3....) di bawah ini. Pada musim gelombang lemah terjadi penurunan pendapatan yang sangat signifikan dari tahun 2005, 2007, dan 2009. Persentase penurunan sekitar 21 persen per tahunnya. Hal ini kemungkinan besar karena pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada tahun 2009 hampir separo dari pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada musim gelombang lemah di tahun 2007, dan jika dibandingkan dengan tahun 2005 pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan hanya sekitar sepertiga dari tahun 2005.

Tabel 3.9. Tren Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Menurut Musim.

Pendapatan Rumah Tangga Menurut Musim	2005	2007	2009
Musim gelombang lemah	2.194.235	1.466.341	815.959
Kenaikan/perubahan	- 21,42 % per tahun		
Musim pancaroba	947.073	989.652	568.138
Kenaikan	- 11,99 % per tahun		
Musim gelombang kuat	449.264	793.609	499.260
Kenaikan/perubahan	- 2, 69 % per tahun		

Sumber : Survei Rumah Tangga Desa Jago-jago, 2009

Tren penurunan pendapatan rumah tangga nelayan tetap terjadi ketika musim pancaroba, namun persentasenya hanya sekitar 12 persen per tahun. Sebetulnya pendapatan rumah tangga nelayan pada tahun 2007 (Rp. 989.652) sudah lebih baik dibandingkan tahun 2005 (Rp. 947.073). Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan tersebut menurun jauh pada tahun 2009. Rata-rata pendapatan nelayan pada musim ini menurun menjadi Rp. 568.138. Dengan demikian pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada saat musim pancaroba di tahun 2009 lebih rendah dibandingkan keadaan pada tahun-tahun sebelumnya (2007 dan 2005).

Menurut penuturan beberapa informan di Desa Jago-jago, perolehan hasil tangkapan semakin sedikit dibandingkan hasil tangkapan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, harga ikan pada tahun 2009 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan harga dua tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan besar yang menyebabkan lebih rendahnya pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada tahun 2009.

Pada musim gelombang kuat, perubahan pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan tetap menunjukkan tren penurunan, tetapi persentase penurunan jauh lebih kecil, hanya 2,69 persen saja. Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan tahun 2009 adalah Rp. 499.260. Kondisi ini jauh lebih jelek jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2007, di mana pendapatan rata-rata rumah tangga mencapai Rp. 793.609. Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan tahun 2009 sebetulnya sedikit lebih tinggi dibandingkan pendapatan tahun 2005, namun karena tahun 2007 pendapatan nelayan lebih besar maka jika dihitung perubahan rata-rata per tahun tetap menunjukkan tren penurunan, meskipun persentase penurunan per tahunnya relatif kecil.

Faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada musim gelombang kuat antara lain disebabkan oleh tingginya harga bahan bakar minyak. Kondisi ini cukup membatasi kemampuan nelayan untuk mencari ikan ke wilayah yang jauh. Pada waktu gelombang kuat itu, pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan tertinggi sekitar Rp. 3.200.000, sedangkan pendapatan terendah hanya Rp. 66.000. Kuatnya gelombang nampaknya mempunyai dampak yang

cukup signifikan terhadap pendapatan nelayan. Pada saat gelombang kuat merupakan masa 'paceklik' bagi para nelayan. Kondisi ini juga masih ditemui pada tahun 2009, bahkan pendapatan yang diperoleh jauh menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, rata-rata pendapatan rumah tangga pada musim gelombang kuat mencapai Rp. 800.000. Pada tahun 2007, pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan terendah Rp. 38.000 dan pendapatan tertinggi mencapai Rp. 6.000.000.

Menurut informasi dari Pak AS yang merupakan nelayan teripang, pada saat musim gelombang kuat, jumlah nelayan yang melaut cenderung berkurang, hanya nelayan dengan armada tangkap berkapasitas di atas 20 PK yang mampu melaut. Dengan demikian, tidak banyak pesaing dalam mencari ikan maupun teripang. Selain itu, karena terbatasnya hasil tangkapan membuat harga ikan laut dan semacamnya melambung tinggi. Oleh karena itu, pada musim ini sementara nelayan juga memperoleh pendapatan yang relatif tinggi. Sementara nilai median pendapatan pada musim gelombang kuat pada tahun 2007 adalah Rp. 500.000, sedangkan pada tahun 2009 nilai median untuk pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada musim ini adalah 363.750. Menurut informasi di lapangan, menurunnya pendapatan rumah tangga nelayan pada musim gelombang kuat karena semakin sedikitnya nelayan Desa Jago-jago yang mencari teripang maupun ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena keterbatasan alat tangkap.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perubahan pendapatan rata-rata per kapita Desa Jago-jago menunjukkan tren menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan COREMAP dari aspek ekonomi yang diukur berdasarkan kenaikan pendapatan perkapita sekitar 2 persen per tahun nampaknya masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Kegiatan MPA yang dilaksanakan di tingkat desa nampaknya belum mampu meningkatkan pendapatan rata-rata rumah tangga. Sebetulnya dengan adanya kegiatan MPA, budidaya lele misalnya, para nelayan diharapkan mendapatkan tambahan penghasilan yang memadai. Para nelayan masih tetap dapat melakukan aktivitasnya

menangkap ikan di laut, sedangkan kegiatan budidaya ikan lele dapat dilakukan sepulang dari melaut.

Belum berhasilnya pelaksanaan COREMAP dari aspek ekonomi kemungkinan besar karena belum semua masyarakat mendapatkan dana bergulir dari COREMAP II. Dari 100 rumah tangga yang menjadi sampel dalam kajian ini, baru 22 persen yang mendapatkan dana bergulir COREMAP II tersebut. Bantuan dana bergulir yang mereka terima juga bermacam-macam, seperti peralatan, bibit, dan uang tergantung dari usahanya.

Kelompok masyarakat yang mengelola usaha budidaya lele diberikan peralatan yang berupa kolam untuk pengembangan budidaya tersebut. Selain peralatan untuk pembuatan kolam budidaya mereka diberi bibit lelenya dan uang untuk pembelian makanan lele.

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam kegiatan pengolahan produk juga diberikan peralatan seperti dandang, kompor, mixer, nampan dan sebagainya. Selain itu mereka juga diberi uang sebanyak Rp. 500.000 untuk modal awal usaha guna pembelian bahan baku baik tepung, rumput laut, ikan atau bumbu-bumbu sesuai dengan kebutuhan usaha kelompok.

Bagi kelompok masyarakat yang tergabung dalam pengelolaan kedai pesisir, bantuan dana bergulir COREMAP II yang diberikan berupa uang. Uang tersebut digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang-barang kebutuhan usaha dagang yang diusahakan di kedai pesisir tersebut.

Pemberian dana bergulir COREMAP II yang berbentuk uang secara ringkas dapat dijelaskan bahwa kecenderungannya antara lain digunakan untuk modal industri, modal usaha budidaya, dan untuk pengadaan barang.

Tujuan dari pemberian bantuan atau dana bergulir COREMAP II adalah untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. Bantuan atau dana bergulir COREMAP II yang diberikan diharapkan dapat

merupakan dana stimulan untuk melakukan usaha kegiatan ekonomi produktif yang membantu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya upaya peningkatan pendapatan rumah tangga melalui usaha kegiatan ekonomi produktif dengan memberikan bantuan atau dana bergulir hasilnya belum seperti yang diharapkan. Sebanyak 22 rumah tangga sampel yang menerima bantuan atau dana bergulir COREMAP II, lebih dari separonya (54,5 persen) mengatakan bahwa dana tersebut belum dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Alasan yang dikemukakan oleh responden dari 12 rumah tangga yang menyatakan bahwa bantuan atau dana COREMAP II belum meningkatkan pendapatan rumah tangga cukup bervariasi. Alasan tersebut yang terbanyak adalah karena usaha gagal (69,2 persen). Seperti pernah dijelaskan sebelumnya usaha kegiatan ekonomi yang pernah diperkenalkan di Desa Jago-jago antara lain adalah melalui pemberian ternak (itik, kambing) dan budidaya kepiting, nampaknya tidak memberikan hasil. Ketika tahun 2005 usaha kegiatan ekonomi tersebut masih berjalan, ternyata pada tahun 2009 usaha tersebut sudah tidak ada lagi (gagal). Selain usaha gagal, alasan yang disampaikan responden mengapa bantuan COREMAP II tidak dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga adalah karena dana terlalu kecil (15,4 persen), usaha belum memberikan hasil dan usaha merugi, masing-masing 7,7 persen.

Bantuan COREMAP II, selain berbentuk bantuan atau dana bergulir, juga berupa bangunan fisik untuk pembuatan pondok informasi dan pembangunan balai pertemuan. Dalam hal ini, 100 rumah tangga sampel juga ditanyakan mengenai apakah mereka mengetahui bahwa adanya bantuan tersebut.

Pembangunan pondok informasi oleh COREMAP II diketahui oleh sebagian besar responden (70 persen). Hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Jago-jago diperoleh informasi bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya bangunan pondok informasi tersebut. Dengan adanya pondok informasi tersebut akan dapat memudahkan para nelayan untuk mendapatkan tambahan informasi

mengenai kegiatan COREMAP II. Namun demikian, sebagian informan mengatakan bahwa bangunan pondok informasi belum dimanfaatkan secara maksimal karena sering dalam keadaan terkunci sehingga masyarakat nelayan tidak dapat memanfaatkannya misalnya untuk membaca buku-buku atau laporan terkait dengan kegiatan COREMAP II di Desa Jago-jago.

Selain pembangunan pondok informasi, kegiatan COREMAP II di Desa Jago-jago adalah membangun Balai Pertemuan. Mayoritas responden (79 persen) mengetahui keberadaan Balai Pertemuan yang dibangun oleh COREMAP II. Pada umumnya responden mengatakan bahwa bangunan tersebut sangat bermanfaat karena mereka dapat memanfaatkannya untuk pertemuan warga. Sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung karena terlibat dalam proses pembangunan Balai Pertemuan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Pelaksanaan COREMAP II yang terdiri dari beberapa komponennya di Kabupaten Tapanuli Tengah dimulai pada tahun 2004. Berbagai kegiatan telah dilakukan dengan menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam merehabilitasi, melindungi, dan melestarikan ekosistem terumbu karang, yang sekaligus juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi program. Pelaksanaan kegiatan COREMAP selama hampir lima tahun tersebut telah memberikan dampak pada masyarakat di lokasi kegiatan, baik dari aspek ekonomi maupun non ekonomi.

Dari aspek ekonomi, kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan kegiatan usaha ekonomi produktif yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan rumah tangga. Secara umum, terjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduk dari tahun 2007. Data yang ada menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan perkapita Desa Jago-jago tahun 2009 (T2) lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2007 (T1). Kenaikan pendapatan per kapita ini berkontribusi terhadap naiknya pendapatan rata-rata rumah tangga Desa Jago-jago.

Hasil wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga dari dua tahun sebelumnya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah penghasilan yang diperoleh dari usaha tanaman keras yang berupa karet. Pada tahun 2007 ketika dilakukan kajian BME (T1), usaha ini belum memberikan dampak yang nyata, namun pada tahun 2009 sebagian besar responden mendapatkan penghasilan dari usaha menyadap tanaman karet ini, termasuk para nelayan. Bagi para nelayan,

upah yang diterima dari menyadap karet (sekitar Rp. 700.000) per bulan, memberikan tambahan penghasilan rumah tangga yang signifikan ketika penghasilan utama sebagai nelayan mengalami penurunan.

Selain penghasilan tanaman keras, usaha pertanian tanaman pangan seperti sayur-sayuran juga menambah penghasilan rumah tangga Desa Jago-jago. Tanaman sayur-sayuran seperti kacang panjang, mentimun, dan terong memberikan hasil yang cukup lumayan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Penghasilan dari industri pengolahan daun nipah yang masih tetap berlangsung juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga Desa Nelayan secara keseluruhan. Kenaikan rata-rata pendapatan rumah tangga Desa Jago-jago dari tahun 2007 – 2009 bagi sebagian responden dipengaruhi oleh adanya kesempatan kerja di tambak udang maupun penyedia jasa seperti becak motor maupun jasa penyeberangan (sampan).

Kenaikan pendapatan rata-rata rumah Desa Jago-jago juga tidak terlepas dari adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentunya salah satunya dari COREMAP II. Bantuan dana yang diberikan oleh COREMAP yang dirasakan bermanfaat dalam menambah pendapatan rumah tangga adalah adanya usaha budidaya lele maupun industri rumah tangga seperti pembuatan dodol rumput laut dan kerupuk ikan. Meskipun belum secara signifikan memberikan dampak ekonomi bagi peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga Desa Jago-jago, kegiatan COREMAP II oleh sekelompok penduduk dinilai memberikan manfaat ekonomis. Penjelasan informan bahwa dengan adanya bantuan atau dana bergulir dapat memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif merupakan satu indikasi dari capaian ekonomi dari COREMAP II. Namun demikian, karena di Desa Jago-jago juga terdapat program terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti dari PNPM Mandiri, KUBE, GAPOKTAN, dan sebagainya membuat capaian ekonomi COREMAP II dinilai oleh sebagian masyarakat belum kelihatan nyata. Hal ini dapat dimengerti karena adanya keterbatasan pengetahuan penduduk yang hanya

mengukur keberhasilan tersebut menurut besaran dana yang dikucurkan oleh suatu program.

Program-program pemberdayaan ekonomi produktif yang dilakukan di Desa Jago-jago selain COREMAP II memang memberikan dana yang relatif lebih besar. Sekitar 20 orang responden dalam survey rumah tangga ini memperoleh bantuan modal usaha selain COREMAP II. Program PNPM Mandiri misalnya, juga memberikan bantuan untuk modal usaha. Besarnya bantuan berbeda-beda tergantung dari pengajuan kelompok, namun sebagian besar di atas Rp. 1.000.000. Jika kelompok tersebut menunjukkan kinerja yang bagus maka pada tahap berikutnya dapat mengajukan pinjaman yang lebih besar.

Selain dana, mereka juga ada yang memberikan bantuan armada atau alat tangkap seperti dari program PNPM Mandiri dan bantuan sarana atau alat pertanian (dari KUBE dan GAPOKTAN). Pemberian sarana atau armada tangkap maupun sarana alat pertanian dirasakan sangat membantu dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga.

Sementara itu, khusus untuk pendapatan rumah tangga nelayan pada tahun 2009 justru menunjukkan penurunan yang cukup tajam dibandingkan pada kondisi tahun-tahun sebelumnya (2005 dan 2007). Pada 2009 rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan hanya sekitar Rp. 616.000, itupun karena pengaruh dari nilai tertinggi. Pendapatan nelayan yang tertinggi mencapai Rp. 3.575.000 per bulan, sedangkan pendapatan nelayan terendah hanya Rp. 75.000 per bulan. Kesenjangan pendapatan antar dua kelompok tersebut sangat tinggi. Kelompok yang masuk dalam kategori berpendapatan tertinggi adalah nelayan pemilik bagan pancang dan atau nelayan tangkap dengan target tangkapan ikan atau teripang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nelayan yang masuk dalam kategori berpendapatan rendah adalah nelayan miskin, biasanya nelayan pekerja/anak atau nelayan perorangan dengan alat tangkap yang sangat sederhana.

Dari hasil hitungan pendapatan dengan menggunakan nilai median, rata-rata pendapatan rumah nelayan adalah Rp. 469.167. Jumlah ini kemungkinan besar mendekati kenyataan di lapangan, karena penghitungan nilai ini tidak terpengaruh oleh nilai terekstrim dari kasus yang ada. Dengan demikian dapat diungkapkan kemungkinan besar pendapatan nelayan berkisar antara jumlah tersebut.

Menurunnya jumlah pendapatan nelayan ditengerai karena semakin berkurangnya frekuensi melaut maupun terbatasnya wilayah tangkap. Hal ini disebabkan sebagian nelayan mulai beralih kegiatan ekonomi dari nelayan ke usaha pertanian tanaman keras (karet) dan tanaman pangan (sayur-sayuran) yang dianggap memberikan hasil yang lebih memadai. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan selama bertahun-tahun nampaknya tidak mampu menahan mereka untuk tidak tergoda mencari penghasilan di bidang lain. Adanya kesempatan kerja di bidang pertanian yang memberikan penghasilan cukup memadai, dan didorong oleh semakin menipisnya perolehan hasil tangkap menyebabkan sebagian nelayan enggan melaut. Program mata pencaharian alternatif dari COREMAP seperti budidaya ikan lele dianggap belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga nelayan di Desa Jago-jago. Kesabaran dan keuletan dalam mengelola usaha budidaya nampaknya memang harus terus ditekankan.

Jika dijelaskan lebih terinci mengenai pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan berdasarkan musim, pada musim gelombang lemah kelihatan sekali kesejajaran antara nelayan yang termasuk dalam kategori berpendapatan tertinggi (Rp. 6.375.000) dan terendah (Rp.200.000). Pada musim gelombang lemah ini, hasil tangkapan melimpah sehingga kadang-kadang harga ikan menjadi turun. Hal ini juga yang menyebabkan mengapa penghasilan sebagian nelayan, khususnya nelayan tradisional, tidak begitu tinggi meskipun musim banyak ikan. Padahal, pada tahun 2007 rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan pada saat musim gelombang lemah yaitu musim banyak ikan mencapai hampir Rp. 1.500.000 per bulan. Pada tahun 2005, jumlah rata-rata pendapatan rumah tangga bahkan mencapai sekitar Rp. 2.100.000.

Meskipun demikian, kesejangan pendapatan pada tahun-tahun tersebut juga sangat tinggi. Pada tahun 2007 misalnya, pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan terendah hanya Rp. 150.000 dan pendapatan tertinggi mencapai Rp. 9.000.000. Sementara median pendapatan hanya sekitar Rp. 750.000.

Pendapatan nelayan mulai berkurang ketika memasuki musim pancaroba. Rata-rata pendapatan nelayan pada musim ini menurun menjadi Rp. 568.138. Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada saat musim pancaroba lebih rendah dibandingkan keadaan pada tahun-tahun sebelumnya (2007 dan 2005). Harga ikan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya padahal perolehan hasil tangkapan semakin menipis. Hal ini kemungkinan besar yang menyebabkan lebih rendahnya pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada tahun 2009.

Pada musim gelombang kuat pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan semakin menurun (Rp. 499.260). Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan Desa Jago-jago juga lebih rendah dari tahun 2007. Menurunnya pendapatan rumah tangga nelayan pada musim gelombang kuat karena semakin sedikitnya nelayan Desa Jago-jago yang mencari teripang maupun ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena keterbatasan alat tangkap.

Kegiatan COREMAP dengan usaha ekonomi produktif telah memberikan dampak pada kehidupan masyarakat. Meskipun manfaat yang dirasakan tidak tergambar secara signifikan namun beberapa telah memberikan tambahan pendapatan rumah tangga. Belum nampaknya hasil dilihat dari aspek ekonomi karena kegiatan yang ada belum menunjukkan perkembangan yang positif, sebagian baru dimulai, misalnya pembuatan kerupuk ikan dan diversifikasi pengolahan dodol rumput laut.

Meskipun manfaat ekonomi tidak secara signifikan namun manfaat non ekonomi sangat dirasakan dapat memberikan nilai tambah yang dapat dipraktekkan sewaktu-waktu. Namun demikian, pemberian ketrampilan

untuk membuat krupuk ataupun dodol perlu memperhatikan ketersediaan bahan baku, tetapi juga aspek kemudahan mengolahnya.

Aspek pemasaran merupakan kendala utama yang dihadapi oleh para perempuan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tidak tersedia fasilitas untuk memasarkan hasil ketrampilannya. Untuk memasarkan hasil olahan mereka hanya mengandalkan warung-warung yang ada di desa saja.

Permasalahan ketidaktahuan masyarakat tentang kegiatan COREMAP mungkin karena kurangnya sosialisasi adanya kegiatan yang berkaitan dengan program COREMAP kepada masyarakat. Apabila program ini ingin dikembangkan dan diterima masyarakat, mungkin perlu ditata ulang kegiatan sosialisasi yang lebih mengena dan dipahami mereka. Hal yang paling penting adalah penjelasan bahwa keberadaan program COREMAP tidak sebagai "*charity*" seperti program bantuan lain yang pernah ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung untuk dikenalkan pada kegiatan mendatangkan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka. Situasi ini memengaruhi anggapan mereka, bahwa kegiatan ini adalah sama sebagai bantuan yang tidak perlu digulirkan ke orang lain. Kurangnya pengetahuan mereka mengenai dana bergulir ini terlihat dari responden yang mengetahui kegiatan COREMAP, hanya beberapa responden mengetahui dana yang diberikan untuk pengembangan suatu usaha ke depan seharusnya digulirkan pada orang lain.

Dalam kaitan dengan keterlibatan responden pada kegiatan COREMAP, tampaknya tidak semua responden yang mengetahui kegiatan ini terlibat. Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing kegiatan, secara prosentase adalah pada kegiatan pelatihan (50 persen), penyusunan RPTK (45,5 persen), dan pendampingan (43,8 persen). Besarnya jawaban ini dapat dimengerti karena responden terpilih selain nelayan adalah juga pengurus COREMAP yang umumnya terlibat pada program awal dari kegiatan ini. Misalnya pengurus LPSTK akan terlibat dalam rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang dan pelatihan yang diberikan, baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Sementara kegiatan lain seperti pembentukan lembaga pengelola

terumbu karang, pengawasan pesisir & laut, konservasi, MPA, dan jender terbatas pada mereka yang terlibat dalam kelompok tersebut. Misalnya kegiatan itik petelor hanya melibatkan kelompok jender, konservasi hanya kelompok konservasi, dan MPA hanya kelompok ekonomi produktif.

Data yang ada menunjukkan bahwa persentase mereka yang tidak terlibat cukup tinggi dibanding dengan yang terlibat. Gambaran ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Jago-Jago masih rendah dalam kegiatan COREMAP. Permasalahannya memang yang terlibat kegiatan COREMAP masih terbatas terkait dengan jumlah Pokmas hanya tiga yang beranggotakan sekitar 15 orang setiap Pokmas. Kemudian, anggota Pokmas terkadang ada yang terlibat dalam kegiatan COREMAP lain seperti pembentukan lembaga dan pelatihan. Sementara itu, anggota Pokmas pun tidak semua terlibat pada kegiatan COREMAP yang dilaksanakan di desa itu karena umumnya hanya antara 5 hingga 11 anggota yang terlibat. Misalnya kegiatan itik petelor hanya melibatkan 5 anggota jender. Namun sayangnya penentuan penerima kegiatan tersebut kurang dijelaskan kepada anggota lain dan masyarakat, sehingga menimbulkan kecemburuan baik di antara anggota maupun masyarakat. Akhirnya, mereka yang terlibat dan mengikuti pelatihan di luar desa terkadang harus "diam-diam" agar tidak konflik di antara mereka.

Di kalangan penduduk terutama yang tidak masuk dalam kelompok masyarakat. Mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan Pokmas merasa bahwa kegiatan COREMAP hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Padahal, sebagai sesama nelayan mereka merasa bahwa kegiatan COREMAP terutama yang berkaitan dengan MPA melibatkan semua penduduk, khususnya nelayan.

Manfaat COREMAP seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja. Dari aspek sosial kegiatan COREMAP II telah memberikan manfaat yang cukup besar juga. Salah satu dampak dari adanya kegiatan COREMAP dari aspek sosial adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan SDL. Dengan adanya COREMAP

masyarakat menjadi lebih sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang yang dapat memberikan manfaat besar bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat Desa Jago-jago tidak ada yang dengan sengaja mencari ikan dengan jalan merusak terumbu karang seperti dengan jalan menggunakan bom atau menggunakan kapal trawl. Adanya perubahan perilaku penduduk untuk menjaga kelestarian terumbu karang dengan tidak menggunakan alat yang merusak merupakan suatu dampak sosial yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Selain itu, dengan menjadi anggota Pokmas merupakan suatu pengalaman berharga bagi para nelayan yang cenderung bekerja secara individual menjadi kerja kelompok. Mereka mempunyai pengalaman yang berharga untuk dapat mempercayai pihak lain untuk dapat bekerjasama. Selain itu, manfaat lainnya yang diperoleh dari kegiatan COREMAP adalah ketrampilan mereka untuk berorganisasi Seperti yang dituturkan oleh seorang anggota Pokmas Jender, Ar, bahwa pengalaman ikut terlibat dalam kegiatan COREMAP menambah kepercayaan diri dalam berorganisasi. Ar, merasa memperoleh pengalaman dan ketrampilan dan berorganisasi sehingga memudahkan dirinya untuk ikut bergabung dengan kegiatan lain. Selain sebagai salah satu pengurus Pokmas Jender, Ar saat penelitian berlangsung juga bekerja sebagai fasilitator di kegiatan PNPM Mandiri.

Seperti halnya Ar, beberapa ibu anggota Pokmas Jender juga mengatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan adanya kegiatan COREMAP II adalah keatrampilan dalam melakukan suatu pembukuan dan bagaimana melakukann suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perekonomian rumah tangga. Ibu-ibu tersebut selalu rajin mencatat atau membukukan rencana usahanya yaitu pengolahan rumput laut maupun pembuatan krupuk ikan.

Dampak sosial yang dirasakan bermanfaat bagi warga Desa Jago-jago dengan adanya kegiatan COREMAP II, ternyata juga menimbulkan adanya 'kecurigaan' di antara masyarakat terhadap pengurus LPSTK. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan COREMAP di Desa Jago-jago adalah munculnya rasa kecurigaan warga terrhadap kemungkinan

tindakan kecurangan dana yang dilakukan oleh pengurus LPSTK. Salah satu hal yang sangat menonjol adalah kecurigaan terhadap dana yang dikucurkan untuk kredit pesisir. Beberapa informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui seberapa besar dana yang dikucurkan untuk pengelolaan kedai pesisir, Ada rasa kecurigaan yang muncul di sebagian warga bahwa pengurus LPSTK memperoleh manfaat pribadi dengan adanya kegiatan COREMAP II.

Selain munculnya rasa kecurigaan terhadap pengurus LPSTK mengenai dana terkait dengan pengelolaan kedai pesisir, dampak sosial yang muncul dengan adanya kegiatan COREMAP II adalah adanya anggapan bahwa pelaksanaan kegiatan COREMAP II kental dengan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Artinya, mereka yang mendapatkan manfaat langsung terutama terkait dengan kucuran dana adalah mereka yang dianggap mempunyai hubungan persaudaraan atau pertemanan dengan pengurus LPSTK. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bantuan atau dna bergulir hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang kebetulan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pengurus LPSTK.

4.2. REKOMENDASI

COREMAP telah dilaksanakan selama hampir lima tahun. Meskipun sudah ada manfaat yang dirasakan oleh penduduk meskipun dengan tingkat yang berbeda, masih ada berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan COREMAP di tingkat kabupaten maupun lokasi program. Ada beberapa pemikiran untuk upaya mengatasinya, antara lain adalah:

o Pengelolaan di tingkat Kabupaten

COREMAP merupakan program yang dilaksanakan dalam beberapa tahun (*multi years*). Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program berasal dari Pusat (dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan/DKP) yang memerlukan dana APBD sebagai pendamping.

Dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan dengan alasan 'dana belum turun'. Misalnya, dalam hal perekrutan fasilitator atau supervisor misalnya, dengan sistem tender seharusnya sudah dapat dimulai pada awal tahun atau sebelum anggaran turun sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik sehingga terdinya 'kemandekan' dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihindari. Selain itu, diperlukan perencanaan anggaran yang multi years juga sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada waktu seperti yang telah direncanakan.

Perekrutan supervisor hendanya juga sudah direncanakan sebelum periode kontrak supervisor selesai. Dengan demikian, masyarakat tidak harus menunggu lama seandainya seorang supervisor harus diganti. Hal ini dikarenakan kegiatan pendampingan cenderung berhenti bila anggaran berakhir. Padahal, pendampingan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan bimbingan atau dampingan secara tuntas. Masyarakat juga sebaiknya diberitahu mengenai permasalahan terhentinya pendampingan ini sehingga mereka tidak selalu menuntut bila hal itu terjadi.

o **Pengelolaan di tingkat lokasi**

Perlu sosialisasi lebih luas kepada masyarakat terutama tentang kegiatan MPA sehingga tidak ada kecemburuan di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini terlihat bahwa masyarakat umum maupun anggota kelompok merasa tidak begitu jelas tentang mekanisme kegiatan MPA, terutama yang menyangkut masalah pengguliran dana, urutan penerima bantuan dalam kelompok, dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Pemberian ketrampilan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, seperti untuk pengolahan produk rumput laut ataupun krupuk misalnya, seharusnya disertai dengan pelatihan yang memadai dan juga informasi untuk memasarkan produk. Pada saat penelitian ini berlangsung ibu-ibu yang tergabung dalam pengolahan hasil rumput laut masih merasa kurang mengerti bagaimana agar hasil olahan mereka tidak cepat

menjadi basi (berjamur). Dengan keterbatasan pemasaran, hasil olahan mereka tidak dapat bertahan lama, sehingga jika berjamur sudah tidak dapat dijual atau dikonsumsi lagi.

Pemasaran produk hasil olahan nampaknya masih menjadi permasalahan di Desa Jago-Jago, Hasil pekerjaan mereka baru dipasarkan di lingkungan desa. Dengan demikian, produk olahan mereka belum dapat terjual dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, mereka enggan untuk memproduksi lagi karena adanya kekawatiran bahwa hasil kerja mereka tidak ada yang membeli. Hal ini tentunya sangat merugikan mereka karena tidak adanya pengembalian uang yang dapat digunakan untuk modal berikutnya.

Perlunya sosialisasi tentang pemeliharaan ikan lele yang dibudidayakan sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang terlibat dalam budidaya ikan lele hanya membiarkan saja atau tidak mengurus kolam ikannya sehingga beberapa ikan lele mati. Pemberian pakan cenderung tergantung pada supervisor. Sehingga, kalau kelak jika supervisor tersebut sudah selesai kontraknya tentu masyarakat tersebut akan mendapatkan kesulitan dalam meneruskan usaha tersebut.

- ❁ Koordinasi antar dengan instansi lain karena di Desa Jago-jago terdapat beberapa program pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya PNPM dan KUBE. Tumpang tindih kegiatan sehingga masyarakat cenderung melakukan yang memberikan manfaat besar padanya. COREMAP sebetulnya sudah lama dilaksanakan namun karena dana bergulir lebih kecil; dari program lain maka keberhasilannya cenderung kurang diakui. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi di lapangan terutama jika kelompok target memiliki kriteria yang sama.
- ❁ Keterlambatan dana COREMAP dapat diatasi dengan strategi melakukan persiapan kegiatan dengan matang sambil menunggu proses pencairan dana dari pusat, sehingga kegiatan langsung dapat dilaksanakan segera setelah dana turun.

- ❁ Penggunaan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan COREMAP bermanfaat dalam penggunaan dana yang terkontrol, tetapi mengandung kelemahan terkait dengan kompetensi/kualitas SDM. Kendala ini semestinya dapat diatasi dengan melibatkan pihak ketiga dari luar daerah yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Upaya perubahan persyaratan tersebut perlu diajukan ke pemerintah pusat sebagai pengelola COREMAP di tingkat nasional.
- ❁ Meningkatkan frekuensi kunjungan ke lapangan untuk menghindari penyimpangan kegiatan dan dana yang telah disusun dalam perencanaan. Selain itu, kunjungan ke lapangan juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja tenaga pendamping yang tampaknya belum melakukan tugasnya dengan optimal, khususnya mereka yang menangani beberapa lokasi program. Kunjungan divisi dan PIU ke lokasi program juga dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, sehingga berdampak pada kelancaran dan keberhasilan program.
- ❁ Upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan kegiatan UEP telah berdampak positif, tetapi masih terbatas pada sebagian kecil masyarakat. Memilih sasaran program yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan UEP dan menggulirkan bantuan kepada kelompok lain harus dilaksanakan. Dukungan tenaga pendamping dalam pengelolaan usaha pemberdayaan ekonomi perlu ditingkatkan, mengingat kualitas SDM yang masih rendah dan mereka tidak terbiasa bekerja secara berkelompok.
- ❁ Pemberian pelatihan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan pengembangan UEP atau mata pencaharian alternatif cenderung tidak pernah ada. Pemilihan jenis pelatihan ketrampilan yang menitikberatkan pada ketersediaan bahan baku tampaknya kurang efektif. Oleh karena itu, memberikan materi pelatihan juga tidak bisa mengabaikan kemudahan dalam proses pengolahan dan pemasaran.

- Apabila program akan terus dikembangkan, mungkin diperlukan sosialisasi keberadaan program Coremap yang tidak sebagai 'charity' seperti program bantuan lainnya. Hal ini untuk menghindari adanya anggapan kegiatan ini adalah sama dengan bantuan yang tidak perlu ada pengguliran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2007. *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006. Buku 2: Kabupaten*. Jakarta : BPS
- Departemen Kelautan dan Perikanan –DKP. 2004. *COREMAP phase II*. <http://www.dkp.go.id/content.php?c=1366>
- Departemen Kelautan dan Perikanan-Republik Indonesia. 2004. *Sambutan Direktur Jendral Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Pada Peluncuran Proyek Pengelolaan Dan Rehabilitasi Terumbu Karang dan Pemanjapan Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut*. <http://www.dkp.go.id/content.php?c=1530>.
- Dirjen. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005. *Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang*. Jakarta: DKP
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007. *Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK)*.
- Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, 2007. *Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP II*. Jakarta: DKP
- Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) Desa Sitardas. *Laporan Awal Kegiatan Mata Pencaharian Alternatif Penguatan Usaha Supplier Masyarakat (Kedai Pesisir/Grosir)*. COREMAP II Kabupaten Tapanuli Tengah. 2008.
- Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) Desa Sitardas. *Laporan Awal Kegiatan Mata Pencaharian Alternatif Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Paket II (Pembuatan Kerupuk Ikan)*. COREMAP II Kabupaten Tapanuli Tengah. 2008.

- Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (COREMAP II), Departemen Kelautan dan Perikanan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2007.
- Pelatihan MCS DAN PENEGAKAN HUKUM, CV. Sarana Cipta Restu Nauli dengan COREMAP II Kabupaten Tapanuli Tengah. 2008.
- Puslit Oseanologi (P2O)-LIPI dan COREMAP. 2007. *BME Ekologi di Kabupaten Biak*. www.coremap.or.id/monev/article.
- Purwaningsih, Sri Sunarti dan Eniarti Djohan. 2007. BME Aspek Sosial Ekonomi Di Lokasi COREMAP II: Kasus Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Laporan Akhir Training Pengembangan Industri Rumah Tangga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP II) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan CV. Crescent Communication, tahun 2008.
- Laporan Bulanan Periode Juli, Kegiatan Pok Mas dan LPSTK desa Jagojago, Program Coremap II Kabupaten Tapanuli Tengah kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Peduli Pengembangan Kelautan dan Pesisir Nusantara (MP2KPN), Tahun 2006.
- Widayatun dkk, Panduan Penelitian BME Sosial – Ekonomi, Coral Reef Information and Training Center, CRITC – COREMAP II, Jakarta, 2006.

